ANALISIS PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEX* PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

(Studi Empiris pada Bank BNI Syariah)

SKRIPSI

Oleh:

JULIA NUR INDAYANI

NIM. G74215148

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Julia Nur Indayani

Nim : G74215148

Fakultas / Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* pada Bank Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank BNI Syariah)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Januari 2019

Saya yang menyatakan

Julia Nur Indayani

NIM. G74215148

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Julia Nur Indayani NIM. G74215148 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Januari 2019

Pembimbing,

Dr. Hj. Fatmah, ST. MM

NIP. 197507032007012020

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Julia Nur Indayani NIM. G74215148 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 29 Januari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Dr. Fatmah, ST, MM
NIP. 197507032007012020

Penguji II,

Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji III,

Siti Musfiqoh, MEI
NIP. 197608132006042002

Penguji IV,

Hastanti Agustin Rahayu, M.Acc
NIP. 198308082018012001

Surabaya, 31 Januari 2019
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.,
NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : JULIA NUR INDAYANI
NIM : G7421548
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / EKONOMI SYARIAH
E-mail address : INDAHYNI18@GMAIL.COM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEX* PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA (Studi Empiris pada Bank BNI Syariah)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Februari 2019

Penulis

(Julia Nur Indayani)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Analisis Pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* pada Bank Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank BNI Syariah)**" ini menganalisis tentang *Islamic Social Reporting Index* pada Bank Syariah dan *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisi *Islamic Social Reporting Index* pada bank syariah dan *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kulitatif melalui wawancara dan *content analys*is. Subjek penelitian ini adalah *Islamic Social Reporting Index.* Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan publikasi tahun 2017 BNI Syariah. Wawancara dilakukan kepada pegawai BNI Syariah dan *Content Analysis* pada laporan tahun 2017 BNI Syariah. Data dianalisis dengan item-item yang ada dalam *Islamic Social Reporting Index.* Item-item *Islamic Social Reporting Index* yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 50 item, termasuk 6 tema diantaranya investasi dan keuangan, produk dan jasa, karyawan, sosial, lingkungan, dan tata kelola organisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* pada bank syariah saat ini lebih sesuai pada bank umum syariah daripada unit usaha syariah. Untuk bank syariah yang berupa unit usaha syariah dalam penyajian laporannya belum tersendiri, masih mengikuti bank konvensionalnya sehingga hasil yang diperoleh dari *Islamic Social Reporting Index* belum cukup baik. Sedangkan bank umum syariah memiliki hasil *Islamic Social Reporting Index* cukup baik. Dan bank syariah di Indonesia masih mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Bank. Analisis pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* yang dilakukan pada BNI Syariah memberikan hasil yang baik. Hasil analisa *Islamic Social Reporting Index* pada laporan tahunan 2017 BNI Syariah menunjukkan terdapat 43 item yang sesuai dengan *Islamic Social Reporting Index.* Presentase *Islamic Social Reporting Index* yang diperoleh BNI Syariah sebesar 86%. Hal ini menunjukkan bahwa BNI Syariah dalam pengungkapan laporan tanggung jawab sosial telah sesuai nilai-nilai syariah.

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar Otoritas Jasa Keuangan membuat aturan untuk bank syariah dalam penyajian laporan tahunannya. Hasil penelitian ini juga mengharapkan agar BNI Syariah dapat dijadikan sebagai contoh untuk bank syariah lainnya dalam melakukan pengungkapan laporan tahunnanya. Dan diharapkan untuk teori *Islamic Social Reporting* lebih dikembangkan terutama untuk Indeksnya lebih luas diungkapkannya.

Kata kunci:*Islamic Social Reporting Index,* Bank Syariah, BNI Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 15

F. Kegunaan Penelitian 15

G. Definisi Operasional 16

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II KERANGKA TEORITIS 25

A. *Corporate Social Responsibility* 25

1. *Corporate Social Responsibility* secara umum 25

2. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* 29

3. *Corporate Social Responsibility* dalam Prespektif Islam 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Islamic Social Reporting* 35
1. Pengertian *Islamic Social Reporting* 35
2. *Islamic Social Reporting Index* 40
a. Tema Investasi dan Keuangan 40
b. Tema Produk dan Jasa 42
c. Tema Tenaga Kerja 46
d. Tema Sosial 47
e. Tema Lingkungan 48
f. Tema Tata Kelola Organisasi 49
BAB III DATA PENELITIAN 51
A. *Islamic Social Reporting Index* 51
1. Item-item *Islamic Social Reporting Index* 51
2. *Islamic Social Reporting Index* pada Bank Syariah 55
B. Tentang BNI Syariah 56
1. Sejarah BNI Syariah 56
2. Visi dan Misi BNI Syariah 59
3. Tanggung Jawab BNI Syariah 60
C. *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah 66
1. Tema Investasi dan Keuangan *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah 66
2. Tema Produk dan Jasa *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah 67
3. Tema Tenaga Kerja *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah 69
4. Tema Sosial *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah 70
5. Tema Lingkungan *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah 73
6. Tema Tata Kelola Organisasi *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEX* 80
A. Analisis Pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* pada Bank Syariah 80
B. Analisis Pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah 85
BAB V PENUTUP 110
A. Kesimpulan 110
B. Saran 111
DAFTAR PUSTAKA 112
LAMPIRAN-LAMPIRAN 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Syariah *Islamic Social Reporting*.....38
Gambar 3.1 *Current Value Balance Sheet*.....67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan *Islamic Social Reporting* 39
Tabel 3.1 Indeks ISR Tema Investasi dan Keuangan 51
Tabel 3.2 Indeks ISR Tema Produk dan Jasa 52
Tabel 3.3 Indeks ISR Tema Tenaga Kerja 52
Tabel 3.4 Indeks ISR Tema Sosial 53
Tabel 3.5 Indeks ISR Tema Lingkungan 54
Tabel 3.6 Indeks ISR Tema Tata Kelola Organisasi 54
Tabel 3.7 Tema Investasi dan Keuangan *Islamic Social Reporting Index* BNI Syariah 66
Tabel 3.8 Tema Produk dan Jasa *Islamic Social Reporting Index* BNI Syariah 67
Tabel 3.9 Tema Tenaga Kerja *Islamic Social Reporting Index* BNI Syariah 69
Tabel 3.10 Tema Sosial *Islamic Social Reporting Index* BNI Syariah 70
Tabel 3.11 Tema Lingkungan *Islamic Social Reporting Index* BNI Syariah 73
Tabel 3.12 Tema Tata Kelola Organisasi *Islamic Social Reporting Index* BNI Syariah 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia sudah banyak diketahui oleh kalangan atas hingga menengah. Seiring dengan pertumbuhan bank syariah yang cepat, mendorong lahirnya bank syariah untuk melakukan etika pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, sudah sepatutnya bank syariah memerhatikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bagian kedua yaitu Bentuk Badan Hukum Pasal 7 yang berisikan "Bentuk badan hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas"[1], sehingga bank syariah dalam tanggung jawab sosial dan lingkungannya harus berpedoman pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 No. 5 yang berisikan "Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada

[1] Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya". Dan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Bab V Tanggung jawab sosial dan lingkungan Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa laporan tahunan harus berisikan beberapa informasi, salah satunya adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.[2]

Menurut Fauziah dan Yudho J, setiap perusahaan termasuk perbankan yang menjalankan usahanya harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap komunitas yang berkaitan dengan kegiatan operasional bisnisnya. Tanggung jawab sosial tersebut meliputi aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*) atau biasa disebut *triple bottom line* (3P), yang diwujudkan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR).[3] Tujuan utama dari CSR adalah menjadikan perusahaan bukan hanya pada konsep *single – bottom – line* (SBL) dalam hal keuangan saja, tetapi juga pada konsep *triple – bottom – line* (TBL) yang termasuk aspek keuangan, kehidupan sosial serta lingkungan hidup.[4]

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR semakin menjadi sorotan penting dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyak perusahaan yang menyadari bahwa konsep dari CSR adalah pokok penting dari etika bisnis perusahaan.[5] Tanggung jawab sosial atau CSR merupakan sesuatu yang wajib

---

[2] Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[3] Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho J., "Analisi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks", *Jurnal Dinamika Akuntansi*. No. 1, Vol. 5, (2013), 13.

[4] Nailil Faricha, "Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2011 – 2014", *Jurnal Akuntansi Unesa* No. 1, Vol. 4, (2015), 2.

[5] Widarto, "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) (Studi Empiris pada Perusahaan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam dunia bisnis di Indonesia. Perkembangan CSR di Indonesia telah mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya unit-unit bisnis yang melaporkan praktik CSR dalam laporan tahunannya atau yang sering disebut *annual report* dan *official website* perusahaannya.[6]

Selama ini pengungkapan CSR yang dilakukan oleh instansi atau lembaga syariah masih mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Kedua peraturan tersebut diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keungan bagi seluruh bank konvensional dan bank syariah. Padahal praktik pengungkapan tanggung jawab sosial menurut perspektif Islam seharusnya berbeda dengan perspektif konvensional. Hal ini karena pertanggungjawaban yang dilakukan lembaga syariah bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan sang pencipta alam semesta.[7]

Di Indonesia, konsep CSR mulai berkembang ke arah yang lebih positif. Konsep CSR saat ini tidak hanya berkembang di ekonomi konvensional, tetapi juga berkembang dalam ekonomi Islam. Konsep CSR dalam Islam erat kaitannya dengan lembaga-lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan konsep syariah. Konsep tersebut

---

Terdaftar di Daftar Efek Syariah Tahun 2015)", (Naskah Publikasi Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017), 2.

[6] Ali Rama dan Meliawati, "Analisis Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting: Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah,* No. 1,Vol. 2, (2014), 96.

[7] Widarto,Pengaruh Profitabilitas…,2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan perusahaan dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara Islami.[8] Dan bank syariah adalah contoh dari sekian banyaknya lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

Berhubungan dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di lembaga keuangan syariah, saat ini ramai diperbincangkan mengenai *Islamic Social Reporting Index* yang selanjutnya disebut Indeks ISR. Indeks ISR merupakan standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), hanya saja standar yang dikeluarkan AAOIFI tidak menyebutkan keseluruhan item–item terkait CSR yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Dengan adanya Indeks ISR, diyakini dapat menjadi suatu langkah awal dalam hal penyusunan standar pengungkapan tanggung jawab sosial suatu lembaga yang berbasis syariah.[9]

ISR pertama kali dikemukakan oleh Haniffa pada tahun 2002 dengan melakukan pengungkapan 5 tema, lalu dikembangkan oleh Othman et al. pada tahun 2009 dengan menambahkan 1 tema dalam pengungkapan Indeks ISR.[10] Enam tema tersebut ialah; investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja atau karyawan, sosial atau masyarakat, lingkungan, dan tata kelola organisasi. Haniffa mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka

---

[8] Tika Astuti,"Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di JII Tahun 2010-2012)",Artikel,2.
[9] Widarto,Pengaruh Profitabilitas…,2.
[10] Nailil Faricha,Analisis Faktor – Faktor..., 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konseptual *Islamic Social Reporting* berdasarkan ketentuan syariah yang tidak hanya membantu pengambilan bagi pihak muslim melainkan juga membantu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya terhadap Allah SWT. Haniffa juga mengatakan bahwa ISR merupakan pelaporan sosial yang tidak hanya meliputi harapan masyarakat terhadap peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga pada perspektif spiritual.[11]

Fitria dan Hartanti berpendapat bahwa Indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan prespektif Islam.[12] ISR dan CSR memiliki perbedaannya yaitu adanya indikator zakat dalam Indeks ISR yang menyebabkan ISR berbeda dengan CSR. Masyarakat mungkin juga berpendapat bahwa memeriksa zakat dari segi perspektif islam dalam artian pelaporan sama pentingnya karena untuk menarik keyakinan *stakeholder*, terutama *stakeholder* muslim dalam memenuhi kebutuhan rohani mereka.[13] Dari permasalahan yang dipaparkan diatas *Islamic Social Reporting Index* (Indeks ISR) dapat dijadikan sebagai acuan untuk kebutuhan pelaporan kinerja Lembaga Keuangan Syariah dalam perspektif Islam.

Berkembangnya Indeks ISR pada lembaga keuangan syariah di Indonesia turut menjadi perhatian masyarakat terkait dalam hal pengungkapan laporan tahunan yang diharapkan sudah sesuai syariat Islam.

---

[11] Viki Merdeka Putra, "Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Intiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks", (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Gresik, 2013),3.

[12] Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, "Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Intiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks", *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto* (2010), 3.

[13] Viki Merdeka Putra,Islam dan Tanggung Jawab Sosial…,3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut berhubungan dengan industri keuangan syariah di Indonesia yang merupakan pemasaran syariah terbesar di dunia, mengingat jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia ialah Indonesia dan indikasinya terlihat dari 18 juta rekening simpanan nasabah di 2.000 jaringan kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) berdasarkan data BI pada tahun 2016. Maka dari itu sudah sewajarnya keungan syariah di Indonesia patut dikembangkan lebih luas. Selain itu, perkembangan industri keuangan syariah yang semakin pesat baik pertumbuhan secara kuantitas dari segi jumlah lembaga, produk yang makin beragam dan inovatif, kinerja keuangan yang cepat, serta kualitas layanan yang terus membaik.

Hal itu menyebabkan keharusan bagi industri keuangan syariah untuk melaporkan kinerja operasionalnya sesuai dengan pengungkapan Indeks ISR. Bank syariah menjadi salah satu industri keuangan syariah yang tiap tahunnya melaporkan kinerjanya berupa laporan tahunan atau *annual report* keada publik. Laporan tahunan bank syariah dapat menjadi sebuah bukti tertulis tentang kinerja yang dilakukan selama satu periode. Laporan tahunan yang telah dipublikasikan oleh bank syariah maupun industri keuangan lainnya menjadi senjata bagi masing-masing perusahaan dalam menunjukkan kualitas kinerja mereka masing-masing. Salah satu bank syariah atau industri keuangan syariah yang mempunyai laporan tahunan yang baik ialah Bank BNI Syariah.

Bank BNI Syariah menjadi bank syariah yang meraih penghargaan utama diberbagai acara. Salah satu penghargaan yang dieroleh dalam tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skala nasional adalah peraih peringkat nomer satu dalam 20 Best Syariah 2018 yang diselenggarakan oleh Majalah Investor. Dan dalam skala internasional Bank BNI Syariah meraih penghargaan sebagai *The Best Islamic Finance Commercial Bank in Indonesia* tahun 2018 di wilayah Asia Tenggara dalam acara *12th Annual Best Financial Institution Awards* dan *8th Annual Corporate Awards 2018*. Acara tersebut diselenggarakan oleh majalah Alpha Southeast Asia. Bank BNI Syariah juga mampu meraih penghargaan dalam kategori The Best GCG (*Good Corporate Governance*) pada tahun 2017 membuktikkan bahwa kinerja yang mereka lakukan tidak hanya berorientasi ada kinerja finansial saja, tetapi juga dalam hal tata kelola perusahaannya. Bank BNI Syariah mempunyai tata kelola yang baik sehingga mereka layak menjadi pemenang.[14]

Kesuksesan bank BNI Syariah dalam acara penghargaan tidak lepas dari pengungkapan informasi yang mereka publikasikan kepada para *stakeholder.* Informasi yang mereka berikan kepada para *stakeholder* menjadikan Bank BNI Syariah meraih penghargaan dimana-mana.

Keterbukaan informasi yang diberikan oleh Bank BNI Syariah kepada para *stakeholder* berupa artikel-artikel yang dapat diakses langsung melalui website mereka dan laporan yang telah dipublikasikan. Laporan yang telah diublikasikan berupa laporan GCG tahunan dan dapat diakses melalui website resmi Bank BNI Syariah. Dari laporan tahunan tersebut Bank BNI Syariah meraih penghargaan tertinggi yaitu Juara 1 Kategori *Private Keuangan Non*

[14] BNI Syariah, "Penghargaan", *https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/penghargaan* diakses pada 8 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Listed dalam *Annual Report Award* 2014 yang digelar oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ada tahun 2014. Dalam acara penghargaan tersebut laporan tahunan Bank BNI Syariah diriset berdasarkan beberapa indikator penilaian dalam *Annual Report Award* 2014 ini diantaranya keterbukaan informasi (*disclosure*) serta implementasi tata kelola perusahaan yang mengacu kepada ketentuan dan pedoman yang berlaku secara nasional maupun internasional. Selain itu penjabaran kinerja perusahaan serta informasi keuangan menjadi pendukung dalam penilaian award tahunan ini.

Dengan diraihnya penghargaan ada acara ini dapat membuktikan bahwa Bank BNI Syariah memiliki laporan tahunan yang sangat baik. Laporan tahunan yang telah dipublikasikan oleh Bank BNI Syariah otomatis menjadi sebuah senjata bagi bank syariah tersebut. Karena dalam laporan yang telah dipublikasikan dapat menjadi penilaian oleh berbagai macam acara penghargaan yang dimana rata-rata yang menjadi indikator penilaian adalah laporan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas terkait dengan Indeks ISR yang sesuai bagi pelaporan industri keuangan syariah dan Bank BNI Syariah yang menjadi objek memiliki pelaoran yang baik. Maka penulis ingin meneliti dengan judul: **"Analisis Pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* pada Bank Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank BNI Syariah)".**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, masalah-masalah yang muncul antara lain, yaitu:

1. Pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* pada Bank Syariah.
2. Pengungkapan Indeks *Islamic Social Reporting Index* pada Bank BNI Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengungkapan Indeks *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah?
2. Bagaimana pengungkapan Indeks *Islamic Social Reporting* pada Bank BNI Syariah?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah penjelasan singkat tentang kajian/penelitian yang telah dilakukan terhadap seputar masalah yang akan diteliti. Sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan terkait dengan topik utama pada penelitian ini adalah analisis pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantara peneliti yang sudah yaitu;

Pertama, penelitian dari Widarto dengan judul "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah Tahun 2015)". Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kinerja lingkungan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting.* Penelitian ini dilakukan dengan objek yang diambil pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah 2015. Penelitian ini memiliki sampel yang diuji sebanyak 44 perusahaan yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Kemudian kinerja lingkungan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.[15] Persamaan penelitian pertama dengan penulis adalah membahas tentang *Islamic Social Reporting*. Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis ialah sampel, objek, dan variabel selain indeks ISR. Dan juga pada penelitian pertama ini item yang diungkapkan dari indeks ISR hanya 43 sedangkan dari penulis ada 50 item indeks ISR.

[15] Widarto,Pengaruh Profitabilitas…,8-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, penelitian dari Viki Merdeka Putra yang berjudul "Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan *Global Reporting Intiative Indeks* dan *Islamic Social Reporting* Indeks". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan dari pengungkapan CSR di bank syariah dengan menggunakan Indeks ISR dengan pengungkapan CSR di bank konvensional menggunakan indeks GRI. Objek penelitian ini pada bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 9 bank konvensional dan 8 bank syariah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengungkapan CSR pada bank konvensional yang menggunakan indeks GRI lebih baik pengungkapanya daripada CSR pada bank syariah yang menggunakan indeks ISR, dan hasil penelitian yang kedua menunjukan bahwa pengungkapan CSR menggunakan Indeks GRI lebih baik dari pada menggunakan Indeks ISR pada bank syariah.[16] Persamaan antara penelitian kedua dengan penulis ialah membahas tentang Indeks ISR pada bank syariah. Perbedaan diantara keduanya sampel, objek, dan adanya indeks GRI. Penelitian ini mengungkapkan indeks ISR dengan 46 item, sedangkan penulis mengungkapkan dengan 50 item.

Ketiga, penelitian dari Mariska Nanda Savira dengan judul "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, *Cross-Directorship,* Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)".

[16] Viki Merdeka Putra, Islam dan Tanggung Jawab Sosial…, 6-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Pengawas Syariah, *cross-directorship*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perbankan syariah di Indonesia. Sampel dari penelitian ini adalah 8 bank umum syariah di Indonesia dengan periode tahun 2010-2013. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ukuran perusahaan, ukuran Dewan Pengawas Syariah, *cross-directorship* dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia, sedangkan ukuran Dewan Komisaris dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.[17] Persamaan penelitian ketiga dengan penulis adalah membahas tentang ISR pada bank syariah dan item yang diungkapkan 50 mengacu pada penelitian dari Fauziah tahun 2013. Perbedaannya sampel dan variabel pendukung selain Indeks ISR.

Keempat, penelitian dari Septi Widiawati dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* Perusahaan-Perusahaan yang Terdapat Pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2009-2011 dalam pengungkapan *Islmic Social Reporting*. Variabel yang diuji untuk penelitian ini terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe

[17] Mariska Nanda Savira, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Cross-Directorship, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)", (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015), 116-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

industri, dan jenis bank. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 75 perusahaan dengan periode tahun 2009-2011. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.[18] Persamaan antara penelitian ini dengan penulis adalah membahas ISR. Perbedaan diantara keduanya adalah sampel, objek, dan variabel selain ISR. Penelitian ini mengungkapkan indeks ISR hanya 38 item, sedangkan penulis 50 item.

Kelima, penelitian dari Dea Devita Sari dengan judul "Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Tahun 2014-2016". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris dan jumlah dewan pengawas syariah terhadap *Islamic Social Reporting* bank syariah di Indonesia dan Malaysia selama periode tahun 2014-2016. Objek penelitian ini bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Sampel penelitian ini 12 Bank Syariah di Indonesia dan 15 Bank Syariah di Malaysia. Hasil penelitian menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh dan signifikan terhadap *islamic social reporting* bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya, profitabilitas, *leverage*, dan jumlah dewan pengawas syariah tidak berperngaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*.[19] Persamaan penelitian kelima dengan penulis ialah membahas ISR. Perbedaan diantara keduanya sampel yang

[18] Septi Widiawati, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-Perusahaan yang Terdapat Pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011", (Skripsi—Universitas Diponegoro, Semarang, 2012), 5-56.

[19] Dea Devita Sari, "Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Tahun 2014-2016", (Skripsi--IAIN Surakarta, Surakarta, 2018), 83-84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti dan variabel selain Indeks ISR. Indeks ISR pada penelitian ini diungkapkan dengan 46 item, sedangkan penulis menggunakan 50 item.

Keenam, penelitian dari Rita Rosiana, Bustanul Arifin, Muhamad Hamdani dengan judul "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Islamic Governance Scrore* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan pelaporan sosial pada bank syariah Islam di Indonesia. Sampel yang digunakan 10 bank syariah di Indonesia dengan periode tahun 2010-2012. Indeks ISR pada penelitian ini mengungkapkan 45 item. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *islamic social reporting*. Sedangkan profitabilitas, *leverage*, dan *islamic governance scroe* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada perusahaan. [20] Persamaaan antara penelitian ini dengan penulis ialah membahas tentang ISR. Perbedaan diantara keduanya ialah item yang diungkapkan, sampel yang diteliti, dan variabel selain ISR yang diteliti.

[20] Rita Rosiana et al, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Islamic Governance Score Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012), *E S E N S I Jurnal Bisnis dan Manajemen* No. 1, Vol. 5, (April 2015), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* pada bank syariah.
2. Mengetahui dan menganalisis Indeks *Islamic Social Reporting Index* pada Bank BNI Syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat paling tidak terhadap dua aspek:

1. Segi Teoretis

   Dari segi teoretis bisa menambah pengetahuan tentang ekonomi islam khususnya pada teori *Islamic Social Reporting Index*.

2. Segi Praktisi

   a. Bagi *Stakeholder*

   Bagi *stakeholder* dapat menunjukkan bawasannya bank syariah yang menjadi sampel ialah bank syariah yang memiliki implementasi Indeks ISR pada pelaporan tanggung jawab sosialnya. Dan dapat dijadikan contoh pengungkapan laporan untuk bank syariah lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagi BNI Syariah

Bagi BNI Syariah yang menjadi objek penelitian, diharapkan dari hasil penelitian bisa mengembangkan dan menjadikan Indeks *Islamic Social Reporting* sebagai acuan dalam pengungkapan laporan tanggung jawab sosialnya berdasarkan syariah atau secara islami.

G. Definisi Operasional

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan beberapa istilah untuk memudahkan memahami skripsi ini, yaitu :

1. Pengungkapan *(Disclosure)*

   Menurut Suwardjono pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Sedangkan pengertian pengungkapan menurut Evan membatasi bahwa pengungkapan ialah hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan, sedangkan pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media masa lain serta informasi diluar lingkup pelaporan keuangan tidak termasuk dalam definisi pengungkapan.[21]

2. *Islamic Social Reporting*

   Islamic Social Reporting adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. ISR lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting*

[21] Riri Asriati et.al, "Analisis Perbandingan Komponen Islamic Social Reporting (ISR) Pada Bank Syariah Antara Negara Indonesia dan Malaysia", *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung, 2016,5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti selanjutnya. Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) diyakini sangat cocok digunakan karena dianggap sesuai dengan perspektif Islam.[22] Penelitian ini menggunakan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) yang dikembangkan oleh Fauziah tahun 2013. Adapun Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) dalam penelitian ini terdiri dari enam tema yang masing-masing dari tema tersebut terdiri dari beberapa item. Enam tema tersebut diantaranya; investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja atau karyawan, sosial atau masyarakat, lingkungan, dan tata kelola organisasi.

Penilaian indeks ISR dilakukan dengan menggunakan scoring dari nilai 0-1, dengan keterangan:

- Nilai 0 jika tidak ada pengungkapan terkait item tersebut.
- Nilai 1 jika ada pengungkapan terkait item tersebut.

Perhitungan indeks pengungkapan ISR dirumuskan sebagai berikut:[23]

$$\text{Pengungkapan ISR} = \frac{\text{Jumlah skor pengungkapan yang dipenuhi}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times 100\%$$

3. Bank BNI Syariah

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan

[22] Widarto,Pengaruh Profitabilitas…,2.
[23] Mariska Nanda Savira,Pengaruh Ukuran Perusahaan...,37-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan *spin off* pada tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 juni tahun 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada juni tahun 2014 BNI Syariah jumlah cabang mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point*. BNI Syariah telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.[24]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kuliatatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih mengutamakan proses dan makna. Penelitian ini berfokus pada pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* yang selanjutnya disebut Indeks ISR pada Bank Syariah di Indonesia. Dengan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

[24] BNI Syariah, "Sejarah", *https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah* diakses pada 8 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Data tersebut adalah data laporan tahunan atau *annual report* bank BNI syariah yang telah dipublikasikan dan yang paling terbaru ialah tahun 2017. Dan wawancara yang dilakukan dengan pimpinan bank BNI syariah.

2. Subyek dan Obyek

   a. Subyek

      Subyek pada penelitian ini adalah Indes ISR (*Islamic Social Reporting Index*). Penelitian ini mengacu pada peneliti Fauziah tahun 2013 dengan menggunakan 50 item yang diungkapkan dalam Indeks ISR.

   b. Obyek

      Obyek pada penelitian ini adalah Bank BNI Syariah. Pada tahun 2018 Bank BNI Syariah meraih berbagai penghargaan dengan mengandalkan laporan tahun 2017 yang telah mereka publikasikan. Dari laporan yang telah mereka publikasikan menjadikan Bank BNI Syariah meraih peringkat di berbagai ajang penghargaan.

3. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

   a. Sumber Data Primer

      Dalam penelitian ini data primer yang digunakan berupa wawancara kepada pimpinan pegawai bank BNI syariah yang dijadikan objek penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang memberikan data kepada peneliti secara tidak langsung, peneliti harus mencari melalui dokumen atau melalui orang lain.[25] Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa laporan tahunan atau *annual report* Bank BNI Syariah tahun 2017 yang diperoleh dari *website* resminya (www.bnisyariah.co.id).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data primer dilakukan dengan wawacara kepada pimpinan pegawai Bank BNI Syariah. Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan seputar mekanisme pelaporan yang ada di laporan tahun 2017 oleh Bank BNI Syariah. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan tahun 2017 yang diperoleh dari *website* resmi Bank BNI Syariah (www.bnisyariah.co.id).

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan merangkum data-data yang digunakan untuk penelitian dari laporan tahunan masing-masing bank syariah. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan

[25] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam laporan tahunan yang berkaitan dengan pelaporan kinerja sosial sesuai dengan indeks ISR. Reduksi data ditelusuri tidak hanya pada sub tema tetapi hingga ke elemen-elemen yang membangun sub tema tersebut. Dalam proses reduksi data ini, peneliti juga melakukan penilaian dengan memberikan skor untuk setiap tema. Sebagai contoh tema pendanaan dan investasi memiliki 6 komponen subtema. Setiap komponen diberi nilai satu, maka nilai maksimal untuk tema ini adalah 6.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif ini disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan sehingga data dapat tersusun, terorganisasikan dalam pola hubungan yang mudah difahami.[26] Penyajian data dalam penelitian ini merupakan penyajian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai temuan-temuan selama penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk tabel dengan membaginya berdasarkan tema yang ada.

c. Penemuan Hasil

Penemuan hasil yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2015), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta yang ditemukan. Yang pada akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam menilai *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah dengan menggunakan *content analysis method*. *Content analysis* yang digunakan di penelitian ini yaitu dengan memberikan tanda *checklist* (✓) pada tiap item yang mengungkapkan aktivitas sosial pada laporan tahunan bank syariah. Jika item tertentu diungkapkan maka akan mendapakan skor "1", dan jika tidak diungkapkan maka akan mendapat skor "0". Penelitian ini menggunakan Indeks *Islamic Social Reporting* yang telah dikembangkan oleh Fauziah tahun 2013 dengan komponennya terdiri dari 50 item dan terdiri 6 tema yaitu investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja atau karyawan, sosial atau masyarakat, lingkungan, dan tata kelola organisasi. Dan hasil wawancara dianalisis menggunakan analisis induktif yang berupa tertulis dan lisan. Analisis dari teori dan data yang didapat.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dan disetiap babnya akan berisi beberapa subbab yang saling berhubungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dibawah ini uraian secara singkat yang terdiri dari 5 bab dan akan disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, kegunaan hasil penulisan, definisi operasional, metode penulisan, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KERANGKA TEORITIS. Dalam Bab ini berisikan tentang pembahasan landasan teori dari beberapa literatur yang digunakan sebagai alat analisis. Yang mana lebih khusus membahas teori mengenai *Corporate Social Responsibility* dan pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah atau Islami. Sehingga melahirkan teori yang terkait dengan pelaporan tanggung jawab sosial pada perusahaan syariah khususnya bank syariah yaitu *Islamic Social Reporting Index.*

BAB III DATA PENELITIAN. Dalam bab ini berisikan tentang item-item *Islamic Social Reporting Index* yang menjadi acuan penelitian. Dan juga bab ini berisikan tentang uraian data penelitian yang membahas tentang profil BNI Syariah dan deskripsi dari hasil wawancara yang berkaitan dengan pelaporan tanggung jawab yang dikemas dalam lapran tahunan BNI Syariah.

BAB IVANALISIS DATA. Dalam bab ini berisikan uraian dari analisis pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* pada lembaga keuangan syariah dan pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* BNI Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. *Corporate Social Responsibility*

1. *Corporate Social Responsibility* secara Umum

Corporate Social Responsibility atau yang sering dikenal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memiliki beberapa pengertian diantaranya ialah; *The World Business Council for Suistainable Development* mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat. Sedangkan menurut CSR Asia tanggung jawab sosial sebagai komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para *stakeholders*.[27]

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilannya, keluarga, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk

[27] Jono M Munandar, et. al., *Pengantar Manajemen Panduan Komprehensif Pengelolaan Organisasi*, (Bogor: IPB Press, 2014), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan kualitas kehidupan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.[28]

Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.[29]

CSR memiliki manfaat bagi perusahaan, masyarakat, lingkungan, negara, dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 No. 5 yang berisikan "Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya".[30]

---

[28] Nurlela R dan Islahuddin,"Pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan presentase kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating", *Simposium Nasional XI,* Pontianak (2008), 5.
[29] Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
[30] Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implementasi *Corporate Social Responsibility* memilik manfaat bagi perusahaan, masyarakat, lingkungan, negara, dan para pemangku kepentingan lainnya. Berikut ini beberapa manfaat dari CSR:[31]

a. Bagi perusahaan. Perusahaan yang melakukan CRS akan memperoleh empat manfaat, yaitu : (1) keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas, (2) perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*), (3) perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas dan (4) perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).
b. Bagi masyarakat. Praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.
c. Bagi lingkungan. Praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan

[31] Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility* (Gresik: Fascho Publishing, 2007), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannnya.

d. Bagi Negara. Praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut "*corporate misconduct*" atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar atau yang tidak digelapkan oleh perusahaan.

Menurut *Princes of Wales Foundation* ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR yaitu; 1) menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia, 2) *environments* yang berbicara tentang lingkungan, 3) *Good Corporate Governance*, 4) *social cohesion* ialah dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial, 5) *economic strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.[32]

Implementasi CSR di Indonesia semakin berkembang secara pesat. Implementasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia terkait dengan CSR ialah pengungkapan CSR-nya. Istilah pengungkapan dalam akuntansi mengacu pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Dalam arti luas pengungkapan mencakup keluarnya setiap informasi mengenai suatu perusahaan tertentu dalam pelaporan tahunan perusahaan, media massa, majalah dan sebagainya.[33]

---

[32] Dea Devita Sari, "Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Tahun 2014-2016", (Skripsi--IAIN Surakarta, Surakarta, 2018), 20
[33] Ibid., 18-19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini akan dibahas tentang pentingnya perusahaan melakukan pengungkapan CSR.

2. **Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) adalah suatu usaha perusahaan untuk menyeimbangkan komitmen-komitmennya terhadap kelompok dan individual dalam lingkungan perusahaan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan) di luar peran tradisionalnya dalam menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. *Disclosure* (Pengungkapan) didefinisikan sebagai penyediaan atau penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan, biasanya berupa laporan tahunan. Pelaporan keuangan tidak hanya mencakup laporan keuangan, tetapi juga media pelaporan informasi lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh akuntansi, yaitu tentang sumbersumber ekonomi, hutang, laba periodik, dan sebagainya.[34]

Informasi yang dinyatakan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib

[34] Nurhayati Sinaga, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Corporate Sociall Responsibility (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)", (Skripsi—Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan informasi yang wajib diberitahukan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK atau Undang-Undang. Sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yaitu pengungkapan informasi diluar pengungkapan wajib yang diberikan dengan sukarela oleh perusahaan kepada para pemakai. Dimana dalam pengungkapan sukarela yang di laporkan dalam laporan tahunan ini terdapat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.[35]

Kewajiban pengungkapan CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tentang tanggung jawab sosial sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan Pasal 74. Untuk pasal 66 ayat (2) disebutkan bahwa laporan tahunan harus memuat beberapa informasi, tidak hanya laporan keuangan tetapi juga diwajibkan mencantumkan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan pasal 74 menjelaskan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 bagian, pasal 17, dan pasal 34 yang intinya mengatur bahwa setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.[36]

---

[35] Nurhayati Sinaga, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan…, 13.
[36] Dea Devita Sari, "Pengungkapan Islamic Social Reporting…, 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik penerapan CSR telah banyak diterapkan oleh perusahaan publik di Indonesia. Walaupun secara umum praktik CSR lebih banyak dilakukan oleh perusahaan tambang maupun manufaktur. Namun, seiring dengan adanya tren global akan praktik CSR, saat ini industri perbankan juga telah menyebutkan aspek pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan walaupun dalam bentuk yang relatif sederhana. Praktik CSR tidak hanya diterapkan dalam perbankan konvensional saja, namun perbankan syariah juga menerapkan praktik CSR ini. [37]

Seiring dengan praktik CSR di perbankan syariah maka sudah sewajarnya bank syariah melakukan CSR sesuai dengan syariah. Berikut ini akan dibahas tentang CSR dalam presektif Islam agar memudahkan perusahaan-perusahaan berbasis syariah melakukan praktik CSR-nya.

3. *Corporate Social Responsibility* dalam Perspektif Islam

Allah berfirman tentang tanggung jawab sosial:

۞لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)

[البقرة:177]

Artinya: “177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-

[37] Ibid., 35-36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." [Al Baqarah:177]

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat ketimbang hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur dalam shalat. Tanpa mengesampingkan akan pentingnya shalat dalam Islam, Al Quran mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial. Di samping memberikan nilai keimanan berupa iman kepada Allah SWT, Kitab-Nya, dan Hari Kiamat, Al Quran menegaskan bahwa keimanan tersebut tidak sempurna jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan.

Dalam hal ini, maka CSR dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara islami. Perusahaan memasukan norma-norma agama islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh dan pendayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah.[38]

Menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perspektif Islam adalah segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan *discretionary responsibilities* sebagai lembaga *financial intermediary* baik itu bagi individu maupun bagi institusi.

Tanggung jawab religius yaitu kewajiban bagi institusi finansial Islam untuk mematuhi kekayaan ekonomi secara efisien dan menguntungkan. Tanggung jawab hukum yaitu kewajiban institusi finansial Islam untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara beroperasinya institusi tersebut. Tanggung jawab etika yaitu menghormati masyarakat, norma agama dan kebiasaan yang tidak diatur dalam hukum. *Discretionary responsibilities* mengacu pada ekspektasi yang diharapkan oleh pemegang saham bahwa institusi finansial Islam akan melaksanakan peran sosialnya dalam mengimplementasikan cita-cita Islam.[39]

Tanggung jawab sosial adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan terutama perbankan syariah yang beroperasi

---

[38] Suharto E, "CSR Syariah", *Majalah Bisnis & CSR,* Vol. 3 No. 16 Agustus 2010, 204-221.
[39] Mariska Nanda Savira, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Cross-Directorship, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)", (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan berlandaskan alquran dan assunnah.[40] Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam perspektif Islam, maka makin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah. Ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, yaitu pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*). Konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. Dalam perspektif Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi.[41]

Salah satu lembaga bisnis yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariah adalah perbankan syariah. Seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis syariah saat ini, beberapa ahli mulai menggagas bentuk pengungkapan CSR khusus untuk institusi bisnis syariah. Beberapa bentuk pengungkapan CSR yang telah di diantaranya adalah:[42]

a. *Islamic Social Reporting Index* (Indeks ISR), yang digagas oleh Haniffa tahun 2002 dan dikembangkan oleh Othman et al tahun 2009.
b. *Shariah Enterprise Theory* (SET), merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori

[40] Irman Firmansyah, *Tanggung jawab sosial perbankan syariah: suatu kajian dalam pengungkapan laporan tahunan manurut pandangan islam (studi di Indonesia dan Malaysia)*, (Bandung: Mujahid Press, 2013), 44.
[41] Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, "Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Intiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks", *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto* (2010), 10.
[42] Gustani, "Analisis Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial Bank Syariah Berdasarkan *Islamic Social Reporting Index* (Indeks ISR)", (Skripsi—Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok, 2015), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang transendental dan lebih humanis. Salah satu peneliti yang pernah membahas SET adalah Iwan Triyuwono tahun 2007.

c. *Islamicity Performance Index* (IPI), sebuah metode pengukuran kinerja bank syariah yang berisi rasio-rasio keuangan dan sosial. Dikemukakan oleh Hameed et al. (2004)

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan kinerja sosial bank syariah adalah Indeks ISR. Selanjutnya akan dibahas tentang *Islamic Social Reporting.*

B. *Islamic Social Reporting*

1. Pengertian *Islamic Social Reporting*

Standar pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berkembang di Indonesia mengacu pada standar yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiatives* (GRI). Standar GRI dipilih karena memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan.

Peneliti-peneliti ekonomi syariah saat ini banyak yang menggunakan *Islamic Social Reporting* (ISR) untuk mengukur CSR di institusi keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial. *Islamic Social Reporting* adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah.[43]

ISR pertama kali digagas oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul "*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*". ISR kemudian dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan saat ini ISR masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Menurut Ross Haniffa terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual ISR yang berdasarkan ketentuan syariah. ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat.[44]

Tauhid dalam kerangka syariah merupakan pondasi dari ajaran Islam. Secara bahasa, tauhid berasal dari *Ahad* yang artinya satu, tunggal atau esa. Sedangkan secara istilah tauhid memiliki makna bahwa Allah SWT adalah esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam *rububiyah* (ketuhanan), *ubudiyah* (Ibadah), *asma'* (nama-nama), dan sifat-sifat-Nya. Dengan tauhid menunjukkan bahwa alam semesta ini satu dan bahwa

[43] Mariska Nanda Savira, "Pengaruh Ukuran Perusahaan…, 36-37.
[44] Gustani, "Analisis Tingkat…, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh isi dunia ini diikat oleh sebuah inti. Inti yang dimaksud adalah firman Allah:[45]

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾ كُلُوا۟ وَٱرْعَوْا۟ أَنْعَٰمَكُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ﴿٥٤﴾ [طه:53-54]

Artinya: 53. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. 54. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. [Ta Ha:53-54].

Wujud dari tauhid adalah *syahadat*. *Syahadat* adalah pengakuan akan keesaan Allah SWT yang diyakini dalam hati, dibenarkan dengan lisannya, dan dibuktikan dengan amal perbuatan nyata. *Syahadat* merupakan syarat utama seseorang masuk ajaran Islam dan salah satu rukun Islam. Seseorang yang mengucapkan *syahadat* akan menerima konsekuensi dari tauhid berupa kewajiban untuk taat terhadap segala perintah Allah SWT yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Fiqh, dan sumber lainnya seperti; *Qiyas, Ijtihad*, dan *Ijma'*. Tujuan dari hukum syariah ini adalah untuk menegakkan keadilan sosial dan mencaapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.[46]

[45] Bayu Tri Cahya, *Islamic Social Reporting REPRESENTASI TANGGUNG JAWAB DAN AKUNTABILITAS PERUSAHAAN BERBASIS SYARIAH,* Bogor:UIKA PRESS, 2018, 143.
[46] Bayu Tri Cahya…, 143-144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.1
Kerangka Syariah *Islamic Social Reporting*[47]

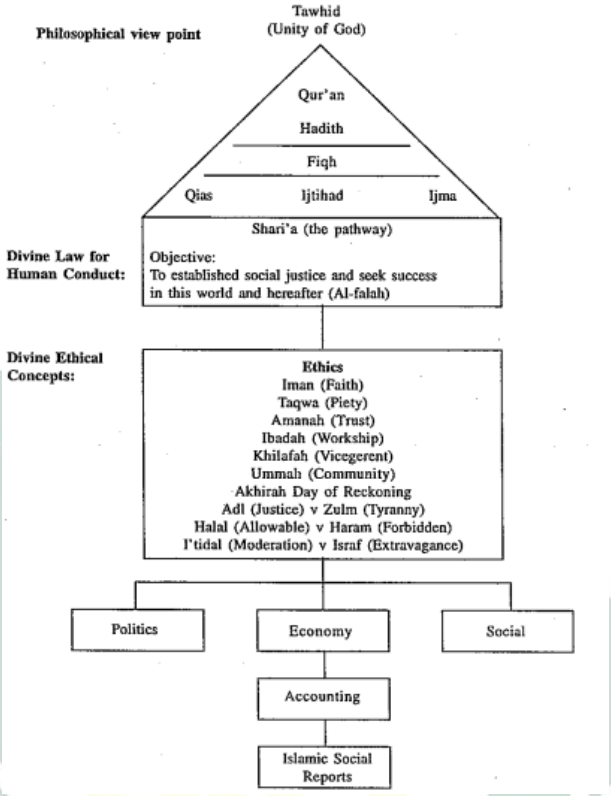

Selanjutnya hukum syariah ini akan menjadi dasar terbentuknya konsep etika dalam Islam. Secara umum etika dalam Islam terdiri dari sepuluh etika yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta.

Sepuluh konsep etika diantaranya iman (*faith*), taqwa (*piety*), amanah (*trust*), ibadah (*workship*), khilafah (*vicegerent*), ummah (*community*), yakin datangnya hari kiamat (*akhirah day of reckoning*), adl (*justice*) dan zulm (*tyranny*), halal (*allowable*) dan haram (*forbidden*), serta i'tidal (*moderation*) dan israf (*extravagance*). Etika tersebut menjadi landasan manusia dalam melakukan aktivitas politik, ekonomi,

[47] Bayu Tri Cahya…,144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sosial. ISR berada di lingkup aktivitas ekonomi khususnya dalam aspek akuntansi. Hal ini membuktikan bawasannya ISR merupakan bagian dari kerangka syariah.[48]

ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan.[49]

Tabel 2.1
Tujuan *Islamic Social Reporting*

Tujuan ISR: - Sebagai bentuk akuntablitas kepada Allah SWT dan masyarakat - Meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan.	
Bentuk Akuntabilitas: • Menyediakan prduk yang halal dan baik • Memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat • Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam • Mencapai tujuan usaha bisnis • Menjadi karyawan dan masyarakat	**Bentuk Transparansi:** • Memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram dilakukan • Memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi • Memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan • Memberikan informasi yang

[48] Ibid., 145
[49] Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, "Islam dan Tanggung…, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis • Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah	relevan mengenai hubungan dengan masyarakat • Memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungan

Sumber: diolah dari Haniffa tahun 2002.

2. ***Islamic Social Reporting Index***

Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR) adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Haniffa pada tahun 2002 membuat lima tema pengungkapan Indeks ISR, yaitu Tema Investasi dan Keuangan, Tema Produk dan Jasa, Tema Tenaga Kerja, Tema Sosial, dan Tema Lingkungan. Kemudian dikembangkan oleh Othman et al pada tahun 2009 dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema Tata Kelola Organisasi.

Setiap tema pengungkapan memiliki sub-tema sebagai indikator pengungkapan tema tersebut. Beberapa peneliti Indeks ISR sebelumnya memiliki perbedaan dalam hal jumlah sub-tema yang digunakan, tergantung objek penelitian yang digunakan. Berikut ialah penjelasan terkait dengan 6 Tema yang ada pada Indeks ISR:

a. **Tema Investasi dan Keuangan (*Finance & Investment Theme*)**

Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal & haram, dan wajib. Beberapa informasi yang diungkapkan pada tema ini menurut Haniffa adalah praktik operasional yang mengandung *riba, gharar* dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivitas pengelolaan zakat. Secara bahasa riba adalah tambahan, artinya setiap tambahan atas suatu pinjaman baik yang terjadi dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan adalah riba. Kegiatan yang mengandung riba dilarang dalam Islam, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-279. Salah satu bentuk riba di dunia perbankan adalah pendapatan dan beban bunga.[50]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) [البقرة:278-279]

Artinya: "278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." [Al Baqarah:278-279].

Kegiatan yang mengandung *gharar* pun merupakan yang terlarang dalam Islam. *Gharar* adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties*. Praktik *gharar* dapat terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Contoh transaksi modern yang mengandung riba adalah transaksi *lease* and *purchace*, karena adanya ketidak jelasan antara transaksi sewa atau beli yang berlaku. Bentuk lain dari *gharar* adalah *future on delivery trading* atau *margin trading*, jual-beli valuta asing bukan transaksi komersial (*arbitage* baik spot maupun *forward*, melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki

[50] Gustani, "Analisis Tingkat..,36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dibeli (*short selling*), melakukan transaksi *pure swap, capital lease, future, warrant, option*, dan transaksi derivatif lainnya.

Aspek lain yang harus diungkapkan oleh entitas syariah adalah praktik pembayaran dan pengelolaan zakat. Entitas syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari laba yang diperoleh, dalam fikh kontemporer di kenal dengan istilah zakat perusahaan. Sebagaimana firman allah tentang zakat terkandung dalam

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ [التوبة:103]

Artinya: "103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." [At Tawbah:103]

Berdasarkan AAOIFI, perhitungan zakat bagi entitas syariah dapat menggunakan dua metode. Metode pertama, dasar perhitungan zakat perusahaan dengan menggunakan metode *net worth* (kekayaan bersih). Artinya seluruh kekayaan perusahaan, termasuk modal dan keuntungan harus dihitung sebagai sumber yang harus dizakatkan. Metode kedua, dasar perhitungan zakat adalah keuntungan dalam setahun. Selain itu bagi bank syariah berkewajiban untuk melaporkan laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode dalam laporan keuangan. Bahkan jika bank syariah belum melakukan fungsi zakat secara penuh, bank syariah tetap menyajikan laporan zakat.[51]

[51] Gustani, "Analisis Tingkat…, 36-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengungkapan selanjutnya yang merupakan penambahan dari Othman et.al adalah kebijakan atas keterlambatan pembayaran oleh *insolvent clients*, neraca dengan nilai saat ini (*Current Value Balance Sheet*), dan laporan nilai tambah (*Value added statement*). Terkait dengan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien Untuk meminimalisir resiko pembiayaan, Bank Indonesia mengharuskan bank untuk mencadangkan penghapusan bagi aktiva-aktiva produktif yang mungkin bermasalah, praktik ini disebut pencadangan penghapusan piutang tak tertagih (PPAP). Dalam fatwa DSN MUI ditetapkan bahwa pencadangan harus diambil dari dana (modal/keuntungan) bank. Sedang menurut AAOIFI, pencadangan disisihkan dari keuntungan yang diperoleh bank sebelum dibagikan ke nasabah. Ketentuan PPAP bagi bank syariah juga telah diatur dalam PBI No.5 Tahun 2003. Item ini wajib diungkapkan oleh instansi syariah, sebagaimana firman allah yang menganjurkan untuk saling tolong menolong adalah [52]

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ [البقرة:280]

Artinya: "280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." [Al Baqarah:280]

[52] Ibid., 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengungkapan lainya adalah Neraca menggunakan nilai saat ini (*current value balance sheet*/CVBS) dan laporan nilai tambah (*value added statement*/VAS). Metode CVBS digunakan untuk mengatasi kelemahan dari metode *historical cost* yang kurang cocok dengan perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai kini. Sedang VAS adalah berfungsi untuk memberikan informasi tentang nilai tambah yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu dan kepada pihak mana nilai tambah itu disalurkan. Dua sub-tema ini tidak digunakan dalam penelitian ini, karena belum diterapkan di Indonesia.

Menurut Haniffa dan Hudaib pada tahun 2007 aspek lain yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah jenis investasi yang dilakukan oleh bank syariah dan proyek pembiayaan yang dijalankan. Aspek ini cukup diungkapkan secara umum.[53]

b. Tema Produk dan Jasa (*Products and Services Theme*)

Menurut Othman et.al beberapa aspek yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah status halal atau syariah dalam produk, pengembangan produk, peningkatan pelayanan, keluhan pelanggan/kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks perbankan syariah, maka

[53] Ibid., 37-38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

status kehalalan produk dan jasa baru yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh DPS untuk setiap produk dan jasa baru.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah dan pengetahuan umum bidang perbankan. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. DPS juga memiliki fungsi sebagai mediator antara bank dan DSN dalam pengkomunikasian dalam pengembangan produk baru bank syariah. oleh karena itu, setiap produk baru bank syariah harus mendapat persetujuan dari DPS. Hal ini penting bagi pemangku kepentingan Muslim untuk mengetahui apakah produk bank syariah terhindar dari hal-hal yang dilarang syariat.

Selain itu pelayanan atas keluhan nasabah harus juga menjadi prioritas bank syariah dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah. Saat ini hampir seluruh bisnis mengedepankan aspek pelayanan bagi konsumen atau nasabah mereka. Karena pelayanan yang baik akan berdampak pada tingkat loyalitas nasabah.

Hal lain yang harus diungkapkan oleh bank syariah adalah *glossary* atau definisi setiap produk serta akad yang melandasi produk tersebut. Hal ini mengingat akad-akad di bank syariah menggunakan istilah-istilah yang masih asing bagi masyarakat, sehingga perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi terkait definisi akad-akad tersebut agar mudah dipahami oleh pengguna informasi.[54]

c. Tema Tenaga Kerja (*Employees Theme*)

Dalam ISR, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan barasal dari konsep etika amanah dan keadilan. Menurut Haniffa dan Othman dan Thani memaparkan bahwa masyarakat Muslim ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan. Tema tenaga kerja terdiri dari; karakteristik pekerjaan, pendidikan dan pelatihan, kesempatan yang sama, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan kerja, dan perekrutan khusus.

Beberapa aspek lainya yang ditambahkan oleh Othman et al adalah kebijakan remunerasi untuk karyawan, kesamaan peluang karir bagi seluruh karyawan baik pria maupun wanita, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, keterlibatan karyawan dalam beberapa kebijakan perusahaan, karyawan dari kelompok khusus seperti cacat fisik atau korban narkoba, tempat ibadah yang memadai, serta waktu atau kegiatan keagamaan untuk karyawan. Selain itu, Haniffa dan Hudaib juga menambahkan beberapa aspek pengungkapan berupa kesejahteraan karyawan dan jumlah karyawan yang dipekerjakan.[55]

[54] Ibid., 38
[55] Ibid., 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tema Sosial (*Social Theme*)

Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah *ummah, amanah*, dan '*adl*. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan saling meringankan beban masyarakat. Islam menekankan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong antar sesama. Bentuk saling berbagi dan tolong-menolong bagi bank syariah dapat dilakukan dengan shodaqoh/donasi, wakaf, *qard hasan*, zakat/sumbangan dari karyawan, pendidikan, bantuan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kepedulian terhadap anak yatim piatu, pembangunan atau renovasi masjid, kegiataan kepemudaan, kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bareng, dan lain-lain), sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain-lain. Jumlah dan pihak yang menerima bantuan harus diungkapkan dalam laporan tahuanan bank syariah. Hal ini merupakan salah satu fungsi bank syariah yang diamanahkan oleh Syariat dan Undang-Undang.

Beberapa aspek pengungkapan tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah shodaqoh/donasi, wakaf, dan qard hasan. Sedang beberapa aspek lain diantaranya adalah sukarelawan atau zakat dari karyawan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberian bantuan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kepedulian terhadap anak-anak yatim piatu, kegiatan amal atau sosial,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama.[56]

e. **Tema Lingkungan (*Environment Theme*)**

Konsep yang mendasari tema ini adalah mizan, *i'tidal, khilafah*, dan *akhirah*. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melestasikan bumi. Allah menyediakan bumi dan seluruh isinya termasuk lingkungan adalah untuk manusia kelola tanpa harus merusaknya. Namun watak dasar manusia yang rakus telah merusak lingkungan ini.

Hal ini telah Allah isyaratkan dalam firmannya:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١) [الروم:41]

Artinya: "41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." [Ar Rum:41].

Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan diantaranya adalah kampanye *go green*, konservasi lingkungan, perlindungan terhadap flora dan fauna liar atau terancam punah,

[56] Ibid., 39-40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

polusi, perbaikan dan pembuatan sarana umum, audit lingkungan, dan kebijakan manajemen lingkungan.[57]

f. Tema Tata Kelola Organisasi (*Good Corporate Governance Theme*)

Konsep yang mendasari tema ini adalah konsep khilafah. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠) [البقرة:30]

Artinya: "30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"." [Al Baqarah:30] .

Tema tata kelola perusahaan dalam ISR merupakan penambahan dari Othman et.al dimana tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna memastikan pengawasan pada aspek syaraiah perusahaan. Secara formal *good corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan stakeholder. *Good Corporate Governance* bagi perbankan syariah memiliki cakupan yang lebih luas, karena

[57] Ibid., 40-41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan yang khas yaitu hukum syariat dan harapan kaum muslim.[58]

Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah profil dan strategi organisasi, struktur organisasi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, kelengkapan tugas dan tanggung jawab komite, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, batas maksimum penyaluran dana, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya, etika perusahaan. Dalam implementasinya di Indonesia prinsip GCG di dunia perbankan telah diatur dalam PBI No. 8 Tahun 2006 mengenai Implementasi Tata Kelola Perusahaan oleh Bank Komersial termasuk bank berbasis syariah.[59]

Penjelasan Indeks ISR diatas merupakan penyesuaian dengan tema penelitan ini, yaitu Bank Syariah. Pada peneltian ini mengambil objek BNI Syariah. Pembahasan lebih rinci terkait item apa saja yang diungkapkan dan pembahasan data yang diambil dari BNI Syariah ada di Bab 3.

[58] Ibid., 41
[59] Ibid., 41-42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DATA PENELITIAN

A. *Islamic Social Reporting Index*

1. Item-item *Islamic Social Reporting Index*

Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR) diyakini sangat cocok digunakan karena dianggap sesuai dengan perspektif Islam. Indeks ISR adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kerja sosial institusi bisnis syariah. Penelitian ini mengacu indeks ISR yang digunakan oleh Fauziah pada tahun 2013.[60] Indeks ISR yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari enam tema yang masing-masing dari tema tersebut terdiri dari beberapa item.

Tema yang pertama adalah tema Investasi dan Keuangan. Tema ini berisikan tentang kegiatan investasi dan keuangan yang dilakukan oleh bank syariah. Item-item yang terdapat ada pada tema ini akan disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indeks ISR Tema Investasi dan Keuangan

No.	Item Indeks ISR Tema Investasi dan Keuangan
1.	Aktivitas riba
2.	Gharar
3.	Zakat
4.	Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran

[60] Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho J., "Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks", *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi* vol. 5, No. 1, Maret 2013, 16-18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	oleh *insolvent clients*
5.	*Current value balance sheet*
6.	*Value added statements*

Sumber: Fauziah[61]

Tema yang kedua dalam Indeks ISR adalah tema Produk dan Jasa. Tema ini berisikan tentang produk dan jasa bank syariah yang terdiri dari empat item. Item tema ini akan disajikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indeks ISR Tema Produk dan Jasa

No.	Item Indeks ISR Tema Produk dan Jasa
1.	Status halal atau syariah dalam produk
2.	Pengembangan produk
3.	Peningkatan pelayanan
4.	Keluhan pelanggan/kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku

Sumber: Fauziah[62]

Tema yang ketiga dalam Indeks ISR adalah tema Tenaga Kerja. Tema ini terdiri dari enam item yang menjelaskan tentang perlakuan bank syariah terhadap karyawan yang dipekerjakan. Item pada tema ini akan disajikan dalam Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Indeks ISR Tema Tenaga Kerja

No.	Item Indeks ISR Tema Tenaga Kerja
1.	Karakteristik pekerjaan
2.	Pendidikan dan pelatihan
3.	Kesempatan yang sama
4.	Kesehatan dan keselamatan kerja
5.	Lingkungan kerja
6.	Perekrutan khusus

Sumber: Fauziah[63]

[61] Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho J., "Analisis Pengungkapan…,16
[62] Ibid., 16-17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tema keempat dalam Indeks ISR adalah tema Sosial. Item-item dalam tema ini berisikan tentang kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa item dalam tema ini sudah sesuai dengan prinsip syariah antara lain yaitu pemberian donasi (*sadaqoh*), wakaf dan dana pinjaman untuk kebajikan (*Qard Hasan*). Item-item tersebut secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Indeks ISR Tema Sosial

No.	Item Indeks ISR Tema Sosial
1.	Shadaqoh/donasi
2.	Wakaf
3.	Qardh hasan
4.	Zakat/sumbangan dari karyawan
5.	Pendidikan
6.	Bantuan kesehatan
7.	Pemberdayaan ekonomi
8.	Kepedulian terhadap anak yatim piatu
9.	Pembangunan atau renovasi masjid
10.	Kegiatan kepemudaan
11.	Kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bareng dan lain-lain)
12.	Sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain-lain

Sumber: Fauziah[64]

Tema yang kelima dalam Indeks ISR merupakan tema Lingkungan. Tema ini terdiri dari tujuh item yang berisikan tentang hubungan bank syariah terhadap lingkungan di sekitarnya. Item tema ini disajikan dalam Tabel 3.5 sebagai berikut:

[63] Ibid., 17
[64] Ibid., 17-18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.5
Indeks ISR Tema Lingkungan

No.	Item Indeks ISR Tema Lingkungan
1.	Kampanye *go green*
2.	Konservasi lingkungan
3.	Perlindungan terhadap flora dan fauna liar atau terancam punah
4.	Polusi
5.	Perbaikan dan pembbuatan sarana umum
6.	Audit lingkungan
7.	Kebijakan manajemen lingkungan

Sumber: Fauziah[65]

Tema terakhir yang digunakan dalam Indeks ISR adalah tema Tata Kelola Organisasi. Tema ini terdiri dari lima belas item tentang bagaimana tata kelola organisasi atau bank syariah yang dilakukan. Item tema ini dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Indeks ISR Tema Tata Kelola Organisasi

No.	Item Indeks ISR Tema Tata Kelola Organisasi
1.	Profil dan strategi organisasi
2.	Struktur organisasi
3.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
5.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
6.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
7.	Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
8.	Penanganan benturan kepentingan
9.	Penerapan fungsi kepatuhan Bank
10.	Penerapan fungsi audit intern
11.	Penerapan fungsi audit ekstern
12.	Batas maksimum penyaluran dana
13.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
14.	Kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya
15	Etika Perusahaan

Sumber: Fauziah[66]

[65] Ibid., 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Item-item Indeks ISR diatas akan diolah dengan menalisis suatu laporan tanggung jawab perusahaan. Perusahaan yang dijadikan objek penelitian ialah BNI Syariah. Berikut penjelasan singkat mengapa penelitian ini berfokus pada BNI Syariah.

2. ***Islamic Social Reporting Index*** **pada Bank Syariah**

Berikut data yang diambil dari literatur tentang pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* pada Bank Syariah:

1. Penelitian dengan judul **"Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting* Indeks"** bertujuan untuk membandingkan pengungkapan tanggung jawab sosial dari ketujuh bank yang menjadi objek penelitian berdasarkan ISR indeks yang sumber datanya didapatkan dari laporan tahunan (*annual report*) yang dipublikasikan masing-masing bank pada *official website*-nya. 7 bank syariah tersebut adalah; Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah, Panin Bank Syariah dan Bank Syariah Bukopin. Penelitian ini mengungkapkan 50 item Indeks *Islamic Social Reporting*. Hasil penelitian ini menunjukkan Bank Muamalat Indonesia (BMI) memiliki tingkat pengungkapan tertinggi

[66] Ibid., 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar 73% dan yang terendah adalah Panin Bank Syariah sebesar 41%.[67]

2. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Bank.** Pada peraturan ini segala sesuatu laporan yang perlu dipublikasikan oleh bank syariah ada didalam sini. Dari laporan keuangan yang dipublikasikan, laporan triwulan, dan laporan tahunan suatu bank syariah maupun konvensional menganut aturan ini.[68]

B. Tentang BNI Syariah

1. Sejarah BNI Syariah[69]

Perjalanan BNI Syariah bermula setelah adanya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan di mana di dalamnya telah diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank dengan sistem bagi hasil. Undang-Undang tersebut juga memberikan aturan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversi secara total menjadi bank syariah. Kemudian pada tanggal 29 April 2000 tercatat berdirinya Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan kantor cabang di beberapa daerah yaitu Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya

[67] Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho J., "Analisis Pengungkapan…, 9
[68] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Bank.
[69] BNI Syariah, "Tentang BNI Syariah", *https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/profileperusahaan* pada 23 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan UUS BNI mampu membuka 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Tahun 2001 BNI Syariah membuka 5 kantor cabang yang berfokus pada kota-kota besar diantaranya Jakarta (dua kantor cabang), Bandung, Makassar, dan Padang. Kehadiran BNI Syariah disambut positif oleh masyarakat dibuktikan dengan perkembangan melalui berdirinya kantor cabang di Medan dan Pekanbaru tahun 2002 dan diawal tahun 2003 melakukan relokasi kantor cabang syariah di Jepara ke Semarang. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Perkembangan tersebut juga diikuti dengan keluarnya Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah. Sebelumnya di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Meskipun rencana *spin off* telah tercatat dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 tetapi realisasi atas rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 merupakan seremonial tanda beroperasinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS) yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kesungguhan dari sisi internal BNI Syariah merupakan bukti masa depan dunia perbankan dengan sistem bagi hasil yang tidak terlepas dari dukungan sisi eksternal.

BNI Syariah semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan secara konsisten setelah beroperasi sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Pada Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 kantor cabang, 161 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 22 mobil layanan gerak dan 20 *payment point*. BNI Syariah senantiasa mendapat dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi infrastruktur BNI Induk diantaranya memiliki lebih dari 14.000 ATM BNI, ribuan jaringan ATM Bersama, ATM Prima serta ATM berlogo Maestro dan Cirrus di seluruh dunia, fasilitas layanan 24 jam BNI Call (021-1500046), SMS Banking, dan BNI Internet Banking, selain itu terdapat 299 outlet syariah yang tersebar di seluruh Indonesia yang didukung lebih dari 1.700 kantor cabang BNI yang melayani pembukaan rekening syariah. Fasilitas dan jaringan yang mendukung senantiasa menjadi pendorong bagi BNI Syariah untuk meningkatkan kualitas layanan serta kuantitas nasabah.

Dalam budaya kerja BNI Syariah, amanah didefinisikan sebagai "menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal. Nilai amanah ini tercermin dalam perilaku utama insan PT. Bank BNI Syariah :

a. Profesional dalam menjalankan tugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab

c. Jujur, adil dan dipercaya Jamaah adalah perilaku kebersamaan umat Islam dengan mengutamakan kebersamaan dalam satu naungan kepemimpinan.

Dalam budaya kerja BNI Syariah, jamaah didefinisikan sebagai "bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban".Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Budaya ini dijabarkan dalam perilaku :

a. Saling mengingatkan dengan santun

b. Bekerjasama secara profesional dan sistematis

c. Saling megingatkn dengan santun

d. Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif.

2. Visi dan Misi BNI Syariah[70]

a. Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi

- Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah
- Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

[70] BNI Syariah, "Visi & Misi", *https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi* pada 23 November 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggan untuk berkarya dan berprestasi sebagai perwujudan ibadah.
- Menjadi acuan tata kelola yang amanah.

3. **Tanggung Jawab Sosial BNI Syariah**

BNI Syariah dalam melakukan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* dibantu oleh Yayasan Hasanah Titik. Lembaga tersebut adalah lembaga yang didirikan oleh PT. BNI Syariah guna untuk mengurus seluruh kegiatan yang terkait tanggung jawab sosial kepada masyarakat. BNI Syariah tidak serta merta lepas dari kegiatan tanggung jawab sosialnya, mereka juga masih melakukan tanggung jawab sosial dengan cara melaporkan serangkaian kegiatannya dalam bentuk suatu laporan. Laporan tersebut yang nantinya laporan tersebut dipublikasi agar para stakeholder termasuk masyarakat mengetahui BNI Syariah ialah perusahaan yang transparansi.[71]

Laporan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh BNI Syariah guna untuk memberitahukan kepada para *stakeholder* bawasannya kinerja BNI Syariah dalam kurun waktu tertentu segalanya tercatat dalam laporan tersebut. Laporan yang dimaksud ialah laporan tahunan. BNI Syariah tiap tahun melakukan laporan pertanggung jawaban yang dipublikasikan dengan nama laporan tahunan atau *annual report*. Segala laporan kinerja BNI Syariah termasuk dalam laporan tahunan yang

[71] Faisal Ramadhan, *Wawancara*, Surabaya, 4 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipublikasikan. Laporan kinerja keuangan, laporan kinerja tanggung jawab sosial, laporan tata kekola organisasinya, dll. Segara laporan tersebut menjadi satu dan selalu dipublikasikan pada awal tahun baru.

Pengungkapan atau pencatatan dalam laporan pertanggung jawaban atau yang dikenal menjadi laporan tahunan tentunya tidak semata-mata dicatat seadanya, pasti pencatatan laporan yang dilakukan oleh BNI Syariah sesuai dengan apa yang menjadi pedoman mereka. Berikut akan dibahas bagaimana proses pecatatan laporan tahunan yang dilakukan oleh BNI Syariah sehingga laporan tersebut menjadikan BNI Syariah memenangkan berbagai penghargaan dan mengembangkan BNI Syariah. Pencatatan yang dilakukan BNI Syariah mengacu pada:[72]

- **Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-346/BL/2011, peraturan No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik**. Keputusan ini digunakan oleh BNI Syariah dalam penyampaian laporan keuangan mereka yang dilakukan secara triwulan. Setelah dilakukan penyampaian laporan keuangan dengan mengacu pada keputusan ini, selanjutnya BNI Syariah melakukan penyampaian laporan tahunan.[73]
- **Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-431/BL/2012, Peraturan No. X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik**. BNI Syariah setelah melakukan penyampaian

[72] BNI Syariah, "Laporan Tahunan", "*https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi/laporantahunan* diakses pada 30 Januari 2019.
[73] Faisal Ramadhan, *Wawancara*, Surabaya, 4 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laporan keuangan dengan acuan keputusan yang pertama, selanjutnya laporan keuangan tersebut disusun dan digabungkan kedalam laporan tahunan. Laporan tahunan yang dilakukannya mengacu pada keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-431/BL/2012 dengan peraturan no. X.K.6. Dalam aturan tersebut terdapat indeks yang mana indeks tersebut digunakan oleh BNI Syariah dalam melaporkan laporan tahunannya. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui laporan yang telah dipublikasikannya bahwa pada sub bab terakhir terdapat item-item yang digunakan dalam indeks X.K.6 oleh BNI Syariah. Setelah dilakukan penyusunan laporan tahunan, selanjutnya BNI Syariah melakukan transparansi dengan cara mempublikasikan informasinya.[74]

- **POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.** BNI Syariah dalam mempublikasikan laporan tahunannya mengacu pada peraturan POJK(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) ini. Dan sebelum dipublikasikan, laporan tahunan yang mereka susun harus terlebih dahulu di periksa oleh auditor yang mana auditor tersebut dari pihak Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.[75]

Menurut pendapat bapak Faisal Ramadhan selaku *bussiness manager* BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya, bahwa

[74] Faisal Ramadhan, *Wawancara*, Surabaya, 4 Januari 2019.
[75] Faisal Ramadhan, *Wawancara*, Surabaya, 4 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme pencatatan laporan tahunan setelah dirapatkan dengan manajemen pusat ada bagian auditor yang mempunyai wewenang dalam menilai laporan tersebut. Setelah diaudit dan disetujui oleh komisaris tentang laporan tahunan yang akan tersebut diserahkan ke pihak DPS (Dewan Pengawas Syariah) untuk disahkan apa laporan tahunan yang akan dipublikasikan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Setelah disetujui oleh beberapa pihak internal BNI Syariah tentang laporan tahunan yang akan dipublikasikan barulah diserahkan ke BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk dicek kembali apakah laporan tersebut siap untuk dipublikasikan. Setelah menerima surat pernyataan atau keputusan bahwa BNI Syariah disetujui untuk melaporkan pertanggung jawabannya yang berupa laporan tahunan, barulah siap untuk dipublikasikan kedalam website resmi BNI Syariah.[76]

Tiap hari ada laporan publikasi yang diinformasikan bagi karyawannya atau khusus pihak internal. Jadi pada saat laporan pertanggung jawaban dipublikasikan dalam website resmi BNI Syariah para karyawan tidak beragumen apa-apa, karena mereka sudah mengerti bahwa apa yang terungkap dalam laporan tahunan adalah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. BNI Syariah dalam melaporkan segala kegiatannya secara apa adanya atau secara terus terang. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan bapak faisal, sebagai contoh laporan yang dilakukannya adalah jika nasabah telat membayar pembiayaannya pada jangka waktu yang telah ditentukan

[76] Faisal Ramadhan, *Wawancara*, Surabaya, 4 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh BNI Syariah maka dari itu nasabah tersebut turun kolektabilitasnya menjadi 2. Hari berikutnya barulah nasabah tersebut membayar tagihannya dan kolektabilitasnya naik kembali menjadi 1. Penurunan dan peningkatan yang terjadi pada nasabah tersebut dilaporkan secara berbeda hari sesuai dengan terjadinya hal tersebut.[77]

Menurut bapak faisal tentang berbagai penghargaan yang didapat oleh BNI Syariah adalah bukti nyata kinerja para karyawannya yang setiap tahun meningkat. Para karyawan atau manajemen pusat juga tidak menyangka bahwa tahun 2018 BNI Syariah mampu meraih penghargaan bergengsi, apalagi kategori yang mereka dapatkan tinggi-tinggi. Menurut beliau mungkin para pesaing BNI Syariah lagi kurang bagus. Dari berbagai penghargaan yang diraih oleh BNI Syariah membuat para karyawan merasa termotivasi untuk melakukan inovasi.[78]

Menurut bapak faisal bahwa sebenarnya efek laporan tahunan yang dipublikasikan kepada masyarakat sebenarnya tidak begitu baik. Apalagi masyarakat juga tidak seluruhnya mengetahui bahwa suatu perseroan atau lembaga keuangan harus melaporkan pertanggung jawaban yang berupa laporan tahunan. Dan beberapa pihak perseroan atau lembaga pasti ada yang merasa bahwa laporan tahunan tidak perlu dilakukan sedetail atau serinci mungkin, karena hanya beberapa pihak (stakeholder) yang membutuhkan laporan tersebut dan masyarakat tidak begitu tertarik. Akan tetapi menurut

[77] Faisal Ramadhan, *Wawancara*, Surabaya, 4 Januari 2019.
[78] Faisal Ramadhan, *Wawancara*, Surabaya, 4 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan BNI Syariah yang diwakilkan oleh bapak faisal bahwa BNI Syariah wajib melaporkan kinerja mereka atau pertanggung jawaban dikarenakan sistem yang mereka jalankan adalah bagi hasil. Yang mana hasil yang dimaksudkan adalah laporan pertanggung jawaban atau laporan tahunan. BNI Syariah menilai bahwa sudah sepatutnya untuk memberikan hasil kepada para stakeholder atau masyarakat untuk mengetahui hasil kinerja yang mereka lakukan dalam kurun waktu 1 tahun atau 1 periode. Hasil tersebut untuk membuktikan bahwa BNI Syariah adalah lembaga keuangan yang transparansi, sehingga para stakeholder tidak ragu untuk memilih BNI Syariah.[79]

Berdasarkan penjelasan singkat tentang BNI Syariah di atas, maka dari itu peneliti ingin mengambil objek BNI Syariah, karena BNI Syariah memiliki berbagai segudang penghargaan yang mana tahun ini khususnya mendapatkan gelar sebagai bank syariah terbaik dari beberapa acara penghargaan. Karena BNI Syariah ialah perusahaan yang berbasis Syariah, maka dalam laporan tahunan yang dipublikasikan oleh BNI Syariah sudah sewajarnya berlandaskan asas syariah. Laporan tahun 2017 yang telah dipublikasikan oleh BNI Syariah menjad objek dalam penelitian ini. Objek tersebut dianalisis berdasarkan *Islamic Social Reporting Index* (Indeks ISR).

[79] Faisal Ramadhan, *Wawancara*, Surabaya, 4 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah

Berikut ini data item-item dalam laporan tahun 2017 BNI Syariah yang sesuai dengan *Islamic Social Reporting Index*:

1. Tema Investasi dan Keuangan *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah

Tabel 3.7
Tema Investasi dan Keuangan *Islamic Social Reporting Index* BNI Syariah

No.	Item yang Diungkapkan	Skor
1	Aktivitas Riba	0
2	Gharar	0
3	Zakat	1
4	Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh *insolvent clients*	0
5	*Current Value Balance Sheet*	1
6	*Value Added Statement*	1

Sumber: Data Sekunder diolah.

Dari tabel 3.7 data BNI Syariah berupa narasi sebagai berikut:

a. Zakat

Yayasan Hasanah Titik (YHT) sebelumnya adalah sebuah Unit Pengelola Zakat (UPZ) BAZNAS direntang waktu akhir 2010 sampai dengan 2014. Sejak Akhir tahun 2014 sampai dengan 2017, setelah menjadi yayasan, YHT bekerja sama dengan Yayasan Dompet Dhuafa (DD) dalam hal pengelolaan zakat. Kerja sama YHT dengan DD adalah dalam rangka memenuhi aspek legal sebuah lembaga/yayasan untuk dapat mengelola zakat dengan nama Mitra Pengelola Zakat (MPZ). YHT sendiri didirikan oleh perseorangan yang menduduki jabatan di BNI Syariah. Namun, untuk menjaga independensi dan nilai-nilai profesionalitas, YHT dikelola oleh SDM yang mempunyai kapabilitas dan serta kapasitas di bidangnya. Untuk menjaga kredibilitas dan nilai-nilai transparansi pengelolaan yayasan, sejak tahun 2015 YHT langsung menggunakan jasa auditor independen untuk menilai kinerja keuangan dan kinerja ketepatan penyaluran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program sosial yang menggunakan dana zakat. Selama 2 (dua) tahun berturut YHT memperoleh opini wajar dalam semua hal material.[80]

b. *Current Value Balance Sheet*

Gambar 3.1[81]

Current Value Balance Sheet (Laporan Posisi Keuangan)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tabel Laporan Posisi Keuangan

(Dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2016	2017	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Aset	28.314,18	34.822,44	6.508,27	22,99%
Aset produktif	25.060,46	29.390,78	4.330,32	17,28%
Pembiayaan yang diberikan	20.493,61	23.596,72	3.103,11	15,14%
Liabilitas	4.684,76	6.612,71	1.927,96	41,15%
Simpanan wadiah	4.079,08	5.970,79	1.891,70	46,38%
Giro wadiah	1.533,15	1.838,11	304,97	19,89%
Tabungan wadiah	2.545,94	4.132,67	1.586,74	62,32%
Jumlah dana *syirkah* temporer	21.142,85	24.402,43	3.259,58	15,42%
Jumlah dana *syirkah* temporer-bukan bank	20.153,93	23.408,50	3.254,58	16,15%
Jumlah dana *syirkah* temporer bank	488,93	493,93	5,00	1,02%
Sukuk *Mudharabah*	500,00	500,00	-	0,00%
Ekuitas	2.486,57	3.807,30	1.320,73	53,11%
Pendapatan	2.801,58	3.189,18	387,61	13,84%
Laba Usaha	391,13	422,91	31,78	8,13%
Laba bersih	277,37	306,69	29,31	10,57%

c. *Value Added Statement* (Pernyataan Nilai Tambah Bank)

Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern BNI Syariah untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan, risiko dan tata kelola Perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi indepedensi dan objektivitas Satuan Pengawasan Intern serta tersedia sumber daya yang memadai.[82]

2. Tema Produk dan Jasa *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah

Tabel 3.8

Tema Produk dan Jasa *Islamic Social Reporting Index* BNI Syariah

No.	Item yang Diungkapkan	Skor
7	Status halal atau syariah dalam produk	1
8	Pengembangan Produk	1

[80] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 417.
[81] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 157.
[82] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9	Peningkatan Pelayanan	1
10	Keluhan pelanggan/kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku	1
7	Status halal atau syariah dalam produk	1

Sumber: Data sekunder diolah

a. Status Halal atau Syariah dalam Produk

Berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2017, DPS menyampaikan bahwa secara umum kegiatan operasional BNI Syariah telah sesuai dengan Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS.[83]

b. Pengembangan Produk

Mengawasi proses pengembangan produk baru dan fitur produk Bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI; Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.[84]

c. Peningkatan Pelayanan

Peningkatan kualitas layanan BNI Syariah telah memperoleh sejumlah penghargaan terkait pelayanan. Namun demikian, Dewan Komisaris terus mendorong Direksi untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Dewan Komisaris memandang, di industri perbankan, persaingan memberikan pelayanan terbaik tidak hanya sebatas sesama bank syariah, tapi juga melibatkan bank konvensional yang tingkat pelayanannya sudah sangat baik.[85]

d. Keluhan Pelanggan/Kejadian yang timbul karena ketidaktaatan

terhadap peraturan yang berlaku

Mekanisme dan Proses Pengaduan dan Penanganan Nasabah Sesuai ketentuan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, BNI Syariah selalu berupaya meningkatkan kualitas layanan dalam penanganan penyelesaian pengaduan nasabah melalui Unit Kerja Khusus yang menangani dan menyelesaikan

[83] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 268.
[84] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 266.
[85] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaduan nasabah. Terkait performance penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah yang berpotensi kerugian finansial terhadap nasabah secara rutin dilakukan pelaporan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.[86]

3. Tema Tenaga Kerja *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah

Tabel 3.9
Tema Tenaga Kerja *Islamic Social Reporting Index* BNI Syariah

No.	Item yang Diungkapkan	Skor
11	Karakteristik pekerjaan	1
12	Pendidikan dan pelatihan	1
13	Kesempatan yang sama	1
14	Kesehatan dan keselamatan kerja	1
15	Lingkungan kerja	1
16	Perekrutan khusus	1

Sumber: Data sekunder diolah

a. Karakteristik Pekerjaan

Perusahaan memberikan fasilitas pendukung pekerjaan yang memadai bagi saya. Pertukaran informasi atau pengetahuan terkait pekerjaan berjalan dengan lancar. Sesama rekan kerja saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan pekerjaan.[87]

b. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan Dan Pengembangan Pada tahun 2017, BNI Syariah berupaya untuk mendorong capability development. Program pengembangan berkelanjutan secara bertahap dilaksanakan oleh Unit Learning Center sesuai dengan profil kompetensi dan strategi bisnis perusahaan. Metode pelatihan dan program pengembangan yang diimplementasikan sepanjang tahun 2017 adalah: 1. Akademi untuk para pegawai baru setara ADP dan ODP; 2. Klasikal untuk pegawai eksisting; 3. Coaching dan Mentoring; 4. Sharing Session untuk pegawai yang tidak mengikuti pelatihan metode klasikal.[88]

[86] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 446.
[87] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 215.
[88] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kesempatan yang Sama

BNI Syariah memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dan oleh karenanya nominasi kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi dikaji serta dievaluasi dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, maupun sumber rekomendasi awal.[89]

d. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BNI Syariah peduli akan keselamatan dan kesehatan para karyawan dengan senantiasa memitigasi dampak terhadap pegawai. Bidang kesehatan dan keselamatan pegawai menjadi bagian dari komitmen Perseroan kepada seluruh pegawai.[90]

e. Lingkungan Kerja

Tingkat Turn Over Pegawai Pengelolaan Sumber Daya Insani dilakukan secara adil dan transparan sejalan dengan budaya Perusahaan BNI Syariah, Amanah dan Jamaah. BNI Syariah berhasil menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi segenap pegawai.[91]

f. Perekrutan Khusus

Referensi checking pada tempat kerja sebelumnya (apabila diperlukan), khususnya untuk perekrutan tenaga berpengalaman (experience hired).[92]

4. Tema Sosial *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah

Tabel 3.10
Tema Sosial *Islamic Social Reporting Index* BNI Syariah

No.	Item yang Diungkapkan	Skor
17	Shadaqoh/donasi	1
18	Wakaf	1
19	Qard Hasan	1

[89] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 306.
[90] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 438.
[91] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 437.
[92] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

20	Zakat/sumbangan dari karyawan atau nasabah	1
21	Pendidikan	1
22	Bantuan kesehatan	1
23	Pemberdayaan ekonomi	1
24	Kepedulian terhadap anak yatim piatu	1
25	Pemangunan atau renovasi masjid	1
26	Kegiatan kepemudaan	0
27	Kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bareng, dan lain-lain)	1
28	Sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain-lain	1

Sumber: Data sekunder diolah

a. Shadaqoh/Donasi

Pengelolaan aktivitas CSR BNI Syariah dilakukan bekerja sama dengan Yayasan Hasanah Titik (YHT). YHT merupakan sebuah lembaga sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang mempunyai afiliasi dengan pengelolaan infaq dan **shodaqoh** PT Bank BNI Syariah yang dibentuk pada Mei 2014. Melalui kerja sama ini diharapkan dapat berdampak secara ganda (multiplier effect) dan berkelanjutan (sustain).[93]

b. Wakaf

Dalam acara ini juga dilakukan lelang **Wakaf** Hasanah bekerja sama dengan Yayasan Al-Azhar untuk pengadaan 1 unit bus universitas.[94]

c. Qard Hasan

Modal usaha untuk masyarakat dhuafa.[95]

d. Zakat/Sumbangan dari Karyawan

2. Zakat Pegawai[96]

[93] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 417.
[94] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 18.
[95] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 418.
[96] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pendidikan

1. 17 Taman baca/Perpustakaan
2. 20 Sekolah penerima manfaat perpustakaan keliling (±2000 siswa)
3. 730 Penerima beasiswa dari anak PGD BNI Syariah
4. 5 Sekolah penerima program renovasi[97]

f. Bantuan Kesehatan

6000an penerima program layanan kesehatan sejak tahun 2012.
1.000 Penerima manfaat program kacamata gratis.[98]

g. Pemberdayaan Ekonomi

17 Pesantren penerima program pengembangan ekonomi pesantren.
Pemberdayaan ekonomi kecil di 6 komunitas ibu rumah tangga.
10 Pemberdayaan ekonomi kelompok melalui duta hasanah BNI Syariah.[99]

h. Kepedulian terhadap Anak Yatim Piatu

22.278 Yatim dhuafa penerima program santunan sejak 2015.[100]

i. Pembangunan atau Renovasi Masjid

2 Pembangunan masjid di Lebak dan Mentawai.[101]

j. Kegiatan Sosial Lainnya (pemberian buku, mudik bareng, dan lain-lain).

Tadarus Anak Hasanah yaitu program belajar Al-Quran bagi anak - anak tidak mampu di sekitar cabang BNI Syariah yang dilaksanakan di 68 kantor cabang seluruh Indonesia (sekitar 20 anak per cabang)

[97] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 418.
[98] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 418.
[99] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 418.
[100] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 418.
[101] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyediaan tenaga pengajar, metode pengajaran BNI Syariah bekerja sama dengan Askar Kauny. Selain belajar dan menghafal Al Qurán, anak-anak diberikan santunan;
Muhassabah Hasanah yaitu perayaan milad BNI Syariah ke-7 dengan menggelar tausiyah dari Ustadz dan santunan anak yatim di 68 cabang BNI Syariah seluruh Indonesia;
Takjil Hasanah yaitu memberikan makanan berbuka takjil kepada para musafir/pengendara yang berpuasa dan sedang melintas di sekitar cabang BNI Syariah yang dilaksanakan di 68 cabang seluruh Indonesia;
Mudik Hasanah adalah program memberangkatkan para hafidz quran ke tujuan asal (mudik gratis).[102]

k. Sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain-lain

BNI Syariah senantiasa berhubungan baik dengan media dengan melakukan kunjungan (media visit) khususnya kepada media mainstream nasional maupun derah, media junket dengan mengunjungi Duta Hasanah dan mitra-mitra BNI Syariah, mengadakan lomba foto dan penulisan bagi wartawan, mendukung kegiatan dalam bentuk sponsorship workshop dan kegiatan olahraga JES.[103]

5. Tema Lingkungan *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah

Tabel 3.11
Tema Lingkungan *Islamic Social Reporting Index* BNI Syariah

No.	Item yang Diungkapkan	Skor
29	Kampanye *go green*	1
30	Konservasi lingkungan	1
31	Perlindungan terhadap flora dan fauna liar atau terancam punah	0
32	Polusi	0
33	Perbaikan dan pembuatan sarana umum	1
34	Audit lingkungan	0
35	Kebijakan manajemen lingkungan	1

Sumber: Data sekunder diolah

[102] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 342.
[103] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kampanye *go green*

Lain lagi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Duta Hasanah dr. Gamal Albinsaid dan Bapak Risnadi Yasir, dan Nezatullah Ramadhan. Ketiga tokoh ini sama-sama menggeluti pengelolaan sampah di wilayah masing- masing. Bapak Risnadi Yasir yang fokus pada program recycle sampah menjadi produk-produk yang bernilai jual di Medan, Sumatera Utara. Mendirikan Bank Sampah yang diberi nama "Bank Sampah Hasanah" dengan melakukan upaya pencegahan kerusakan, pencemaran dan melakukan pelestarian lingkungan baik di sekolah, di masyarakat dan pemerintahan dan melakukan pembinaan untuk mencegah terjadinya kerusakan dengan terus membina masyarakat agar memilah dan mengolah sampah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomis sampai ke pelosok kabupaten Asahan, Sumatera Utara.[104]

b. Konservasi Lingkungan

Konservasi mangrove di Tanjung Pasir.[105]

c. Perbaikan dan Pembuatan sarana umum

6 Desa penerima manfaat program MCK.[106]

d. Kebijakan Manajemen Lingkungan

GEN-Xtra Salah satu langkah yang dilakukan BNI Syariah untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan meluncurkan program GEN-Xtra.[107]

[104] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 427-428.
[105] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 418.
[106] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 418.
[107] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tema Tata Kelola Organisasi *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah

Tabel 3.12
Tema Tata Kelola Organisasi *Islamic Social Reporting Index* BNI Syariah

No.	Item yang Diungkapkan	Skor
36	Profil dan strategi organisasi	1
37	Struktur organisasi	1
38	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1
39	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1
40	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1
41	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1
42	Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1
43	Penanganan benturan kepentingan	1
44	Penerapan fungsi kepatuhan bank	1
45	Penerapan fungsi audit intern	1
46	Penerapan fungsi audit ekstern	1
47	Batas maksimum penyaluran dana	1
48	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	1
49	Kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya	1
50	Etika perusahaan	1
	Jumlah	43
	Presentase	86%

Sumber: Data sekunder diolah

a. Profil dan Strategi organisasi

Profil Perusahaan "BNI Syariah memantapkan positioning sebagai hasanah banking partner yang memadukan fitur dan layanan perbankan modern serta nilai-nilai syariah.77"[108]

[108] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Struktur organisasi

STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan SK Direksi No. KP/21/DIR/R tanggal 3 Juli 2017.[109]

c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dari hasil self assessment terhadap governance structure pada kriteria ini dapat disimpulkan bahwa komposisi dan kriteria Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2016 (tahun buku 2015) telah sesuai.[110]

d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Bahwa komposisi dan kriteria Direksi yang diangkat berdasarkan pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2016 (tahun buku 2015) telah sesuai dan memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bagi kepentingan BNI Syariah dan stakeholders.[111]

e. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Komposisi, kompetensi dan kriteria dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[112]

f. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Komposisi, kompetensi reputasi dan independensi DPS BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga DPS BNI Syariah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.[113]

---

[109] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 58.
[110] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 237.
[111] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 237.
[112] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 237.
[113] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dam penyaluran dana serta pelayanan jasa

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Secara umum BNI Syariah telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.[114]

h. Penanganan benturan kepentingan

Penanganan Benturan Kepentingan BNI Syariah telah memiliki kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Di tahun 2016, BNI Syariah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Benturan Kepentingan No. PP/S02/004-00/2016 tanggal 27 Desember 2016.[115]

i. Penerapan fungsi kepatuhan bank

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Komposisi, kompetensi dan kriteria dari satuan kerja kepatuhan BNI Syariah telah memenuhi ketentuan yang berlaku.[116]

j. Penerapan fungsi audit intern

Penerapan Fungsi Audit Internal Struktur organisasi Audit Internal BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BNI Syariah juga telah memiliki Piagam Internal Audit, panduan internal audit, SDM Audit Internal yang kompeten guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja audit internal.[117]

k. Penerapan fungsi audit ekstern

Penerapan Fungsi Audit Ekstern Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi ketentuan yang berlaku.[118]

---

[114] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 237.
[115] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 237.
[116] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 237.
[117] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 237.
[118] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Batas maksimum penyaluran dana

Batas Maksimum Penyaluran Dana BNI Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.[119]

m. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BNI Syariah telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BNI Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, yang dituangkan dalam :
•Kebijakan Akuntansi dalam Laporan Keuangan yang direview oleh Direksi setiap tahun;
•Prosedur yang dituangkan dalam BPP : Jurnal Akuntansi Syariah, Stelsel Rekening Syariah dan Penjelasannya, Kebijakan Akuntansi Syariah, HB Aktiva dan Pasiva Selain Aktiva Produktif dan Tetap, Rekonsiliasi dan Kebijakan Pos Terbuka, Operasional dan Sentra Akuntansi.[120]

n. Kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya

Kebijakan Program Penerapan APU-PPT Kebijakan Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. BNI Syariah sebagaimana Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum wajib berkontribusi dan bekerja sama dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pemberantasan terorisme tersebut. Hal ini juga disebabkan oleh adanya dinamika nasional, regional maupun global serta diikuti dengan perkembangan produk aktivitas dan teknologi informasi Bank yang semakin kompleks, sehingga berpotensi akan meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan fasilitas dan produk perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan modus operandi yang canggih.[121]

[119] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 238.
[120] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 238.
[121] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

o. Etika Perusahaan

Kode etik merupakan pedoman perilaku Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah rekanan maupun rekan kerja. Adanya aturan dasar tersebut yang dimuat dalam Kode Etik (Code of Conduct menjadikan salah satu komitmen Bank terhadap prinsip-prinsip GCG, yang selama ini mendukung Bank untuk mancapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan keputusan Direksi No.BNISy/ DIR/403 Tanggal 23 Desember 2010, BNI Syariah memiliki Kode Etik dan Budaya Kerja yang berlaku sebagai etika bisnis dan etika kerja Perusahaan. Kode Etik dan Budaya Kerja BNI Syariah ini berlaku bagi seluruh insan BNI Syariah baik Dewan Komisaris, Direksi, maupun pegawai BNISyariah.[122]

[122] Data Sekunder (Laporan Tahunan 2017 BNI Syariah), 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEX*

A. Analisis Pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* pada Bank Syariah.

Islamic Social Reporting menjadi salah satu diantara banyaknya model pelaporan tanggung jawab sosial berdasarkan syariah. Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada lembaga keuangan syariah perlu kita bahas. Sebelum membahas tentang ISR, kita membahas tentang aturan yang digunakan bank syariah dalam menyajikan laporan tanggung jawab sosial atau laporan tahunannya.

Pengungkapan atau penyajian laporan yang dilakukan oleh bank syariah masih mengikuti aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang mana aturan tersebut adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Bank.

Bank syariah dalam penyajian laporan tahunannya disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Bank. Berdasarkan aturan dari OJK tersebut bahwa bank syariah perlu mengungkapkan atau menyajikan laporan tahunan yang memuat; 1) Informasi umum, 2) Laporan keuangan, 3) Informasi kinerja keuangan, 4) Pengungkapan permodalan dan praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank, paling sedikit meliputi uraian jenis risiko, potensi kerugian yang dihadapi Bank, dan mitigasi risiko,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai permodalan dan manajemen risiko, 5) Pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan, dan 6) Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.[123]

Pada peraturan OJK poin pertama informasi umum yang harus diungkapkan atau disajikan oleh bank syariah harus terdiri dari; a) Kepengurusan, termasuk susunan Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah; b) Kepemilikan saham; c) Perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank termasuk apabila ada pengembangan usaha Unit Usaha Syariah (UUS); d) Strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen Bank, termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS; dan e) Laporan manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan Bank, termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS.

Dan pada poin yang kedua laporan keuangan dalam POJK tersebut bank syariah perlu terdiri dari; Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.

Pada poin yang ketiga informasi kinerja keuangan dalam POJK tersebut bank syariah perlu penyajian di laporan tahunannya terdiri dari; Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Jumlah dan

[123] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Bank. Bagian ketiga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Rasio keuangan Bank, Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif.

Dan bank syariah yang merupakan Bank Umum Syariah atau Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah perlu memuat; Laporan Distribusi Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat.

Bank syariah dalam penyajian laporan tahunan harus mengacu pada aturan POJK Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Bank. Dalam aturan OJK tersebut dapat dilihat bahwa masih memiliki kekurangan dalam nilai-nilai syariahnya. Terbukti dari beberapa indikator yang disebutkan dalam peraturan tersebut bank syariah hanya diwajibkan untuk mengungkapkan beberapa laporan tentang distribusi bagi hasil, laporan zakat, laporan dana kebajikan dana laporan investasi terkait. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh OJK masih belum sesuai dengan nilai-nilai Islami yang diterapkan oleh bank syariah. Maka dari ini *Islamic Social Reporting* tumbuh dan lahir agar bank syariah dapat menyesuaikan laporan tahunannya atau laporan tanggung jawab sosialnya berdasarkan nilai islaminya. Dalam *Islamic Social Reporting Index* terdapat pembahasan mengenai transaksi yang diharamkan dalam Islam. Transaksi yang diharamkan dalam Islam seperti adanya ketidakpastian atau *gharar* dan riba. Dalam bank syariah saat ini masih sering terjadi adanya transaksi yang mengandung riba atau yang dikenal dengan bunga. Hal itu bertentangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ajaran Islam bahwa dalam bertransaksi dilarang adanya riba atau bunga. Maka dari itu item ini sewajarnya tidak diungkapkan dalam laporan tanggung jawab suatu lembaga keuangan. Pembahasan tersebut yang menjadi poin penting dari *Islamic Social Reporting Index.*

Dalam *Islamic Social Reporting* bank syariah perlu mengungkapkan atau menyajikan laporannya berdasarkan nilai-nilai Islaminya. *Islamic Social Reporting Index* merupakan alat ukur yang digunakan dalam suatu laporan tanggung jawab sosial perusahaan terutama bank syariah. *Islamic Social Reporting Index* memiliki nilai-nilai syariah pada tiap-tiap itemnya dan sudah sewajarnya bank syariah untuk menyajikan laporannnya berdasarkan syariah. *Islamic Social Reporting Index* dapat diukur pada bank-bank syariah yang menyajikan laporan tahunannya secara lengkap tidak hanya pada satu aspek saja.

Pada data yang diperoleh yaitu fauziah mengungkapkan bahwa dari ketujuh bank syariah yang diteliti berdasarkan *Islamic Social Reporting Index* (Indeks ISR) menghasilkan bahwa bank Muamalat Indonesia mendapatkan nilai Indeks ISR 73% dalam pengungkapannya sedangkan Panin bank syariah memiliki Indeks ISR sebesar 41%. Hal ini membuktikan bahwa pada saat itu bank umum syariah memiliki pengungkapan yang baik dan sesuai dengan Indeks ISR. Sedangkan unit usaha syariah memiliki pengungkapan yang kurang baik. Pada saat itu Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum syariah, sedangkan Panin Bank Syariah sebagai unit usaha syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini dapat kita lihat bahwa Indeks ISR atau *Islamic Social Reporting Index* dapat diukur pada bank syariah yang telah menjadi bank umum syariah. Laporan tahunan yang disajikan oleh bank umum syariah berbeda dengan unit usaha syariah, karena laporan tahunan unit usaha syariah masih tergabung dalam bank induk atau bank konvensionalnya sehingga jika dianalisis berdasarkan Indeks ISR hasil yang diperolehnya sedikit. Dan jika dibandingkan dengan bank umum syariah, otomatis hasil yang diperoleh keduanya tidak seimbang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah

Pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* (Indeks ISR) memiliki 6 tema dengan total 50 item yang akan dianalisis pada laporan tahun 2017 BNI Syariah. Dan berikut ini analisa pengungkapan Indeks ISR pada BNI Syariah:

1) Tema Investasi dan Keuangan

Pada tema Indeks ISR yang pertama ini BNI Syariah mengungkapkan beberapa item yang ada pada item ini. Tema yang pertama ini seluruh item Indeks ISR tidak wajib diungkapkan, karena ada beberapa item yang sewajarnya tidak patut diungkapkan dalam suatu laporan pertanggung jawaban atau laporan tahunan perusahaan. Item yang dimaksud adalah adanya aktivitas riba dan gharar karena hal ini sangat dilarang dalam Islam.[124] Pada tema yang pertama ini BNI Syariah mengungkapkan adanya 3 item yang sesuai dengan Indeks ISR yaitu; Zakat, *Current Value Balance Sheet*, *Value Added Statement*. BNI Syariah tidak mengungkapkan transaksi-transaksi non halal dalam pelaporannya. Jika adapun aktivitas riba yang ada didalam laporan tahunan BNI Syariah itu tidak transaksi yang dilakukan lembaga dengan nasabah.[125]

Item yang pertama diungkapkan oleh BNI Syariah adalah zakat. Item ini wajib diungkapkan oleh seluruh lembaga keuangan syariah, karena instansi syariah termasuk BNI Syariah wajib mengeluarkan zakat

[124] Bayu Tri Cahya, *Islamic Social Reporting*…, 147.
[125] Faisal Ramadhan, Wawancara, 4 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperoleh dari laba. Dalam fikih kontemporer zakat yang dikeluarkan oleh instansi dianggap sebagai zakat perusahaan. [126] Sebagaimana firman allah tentang zakat terkandung dalam QS. At Taubah: 103 sebagai berikut

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ [التوبة:103-103]

Artinya: 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [At Tawbah:103]

Item yang diungkapkan oleh BNI Syariah ini terdapat dalam bab tanggung jawab sosial perusahaan, dan pada item zakat ini termasuk dalam kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Hasanah Titik. Yayasan Hasanah Titik ialah lembaga yang dibentuk oleh BNI Syariah guna membantu dalam kegiatan tanggung jawab sosialnya. Akan tetapi dalam pelaporan tanggung jawab sosialnya tetap dilakukan oleh BNI Syariah. Pada item ini BNI Syariah mengungkapkannya secara rinci terdapat penyaluran dan pengumpulan dana zakat. Dalam konteks ini apa yang diungkapkan oleh BNI Syariah sangat baik. Informasi tentang penyaluran dan pengumpulan dana zakat membantu para *stakeholder* terutama *stakeholder* muslim.

Item yang kedua adalah *Current Value Balance Sheet* yaitu nilai kini yang diungkapkan dalam laporan neraca. Pada item ini BNI Syariah

[126] Gustani, "Analisis Tingkat…, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkapkannya dalam laporan keuangan bagian kebijakan akuntansi. Dalam pengungkapan yang dilakukan oleh BNI Syariah terkait dengan perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan atas piutang *murabahah*. Item ini dijadikan sebagai acuan dalam menentukan berapa jumlah zakat yang akan dikeluarkan.[127] Item ini dianjurkan untuk diungkapkan oleh lembaga keuangan syariah termasuk BNI Syariah, tetapi jika ada lembaga keuangan yang tidak mengungkapkan item ini juga diperbolehkan. Karena item ini masih tahap perdebatan dalam PSAK item ini tidak diungkapkan karena menggunakan nilai historis bukan nilai kini atau sekarang. BNI Syariah mengungkapkan item ini dengan baik.

Item yang terakhir pada tema ini adalah *Value Added Statements* yaitu pernyataan tentang nilai tambah. Lembaga keuangan syariah tidak diwajibkan mengungkapkan item ini dalam pelaporannya. Karena item ini lebih berkembang di negara-negara maju dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga, dalam penelitian ini istilah *value added statement* lebih merujuk pada pernyataan nilai tambah dalam laporan tahunan perusahaan.[128] BNI Syariah mengungkapkan item ini dalam tugas dan tanggung jawab IAD, yang mana salah satu pernyataannya adalah memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan, risiko dan tata kelola perusahaan. Jadi

[127] Gustani, "Analisis Tingkat…, 37

[128] Citra Indah Merina dan Verawaty, "Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting Perusahaan Go Publik yang Listing di Jakarta Islamic Index", *Jurnal Ilmiah MBiA* Vol.15 No.1 Agustus 2016, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pegungkapan item ini guna untuk membantu pihak intern BNI Syariah dalam memberikan pernyataan nilai tambah yang mana pernyataan tersebut dapat membantu berkembangnya BNI Syariah. Dalam item ini BNI Syariah mengungkapkannya dengan baik.

Tema investasi dan keuangan yang pertama ini BNI Syariah telah mengungkapkannya dengan baik. Item-item tentang transaksi non halal tidak diungkapkan oleh BNI Syariah dalam pelaporannya, membuktikkan bahwa kegiatan operasionalnya telah bebas dari transaksi yang dilarang dalam Islam.

2) **Tema Produk Dan Jasa**

Pada tema yang kedua ini BNI Syariah mengungkapkan seluruh item berdasarkan Indeks ISR. Item pertama yang diungkapkan adalah status halal atau syariah dalam produk. Pada item yang pertama ini suatu instansi atau lembaga syariah wajib mengungkapkan adanya status halal dalam produk yang mereka punya. Status halal tidak semata-mata hanya mengungkapkan kata halal, akan tetapi melalui pernyataan dari Dewan Pengawas Syariah. Pernyataan tersebut tertuang dalam laporan tahunan yang mana bisa menjadi suatu opini Dewan Pengawas Syariah atau penetapaan Fatwa DSN-MUI.[129] Status halal dalam pelaporan BNI Syariah juga dapat sebagai bukti bahwa produk yang mereka punya sudah

[129] Gustani, "Analisis Tingkat…, 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti aturan dari Dewan Syariah Nasional, itu berarti produk yang mereka jual sesuai dengan prinsip syariah yang ada di Indonesia.

Item kedua yang diungkapkan oleh BNI Syariah adalah pengembangan produk. Item ini perlu diungkapkan dalam laporan tahunan, karena menunjukkan bahwa kinerja BNI Syariah pada tahun 2017 terlaksanakan dengan dilakukannya pengembangan produk. Pengembangan produk yang dilakukan oleh BNI Syariah harus didiskusikan terlebih dahulu oleh pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan setelah pihak DPS mengeluarkan fatwa DSN-MUI terkait dengan produk baru atau yang akan dikembangkan barulah BNI Syariah dapat memasarkan produknya. Pada item ini masih terpusat dengan tugas dan tanggung jawab DPS kepada para bank-bank syariah, yang mana salah satu tugasnya ialah menilai dan memastikan produk yang dipasarkan oleh bank-bank syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Pada item ini BNI Syariah mengungkapkannya secara rinci dan baik.

Item ketiga yang diungkapkan adalah peningkatan pelayanan. Pada item ini seluruh instansi atau lembaga baik syariah maupun yang konvensional patut melakukan peningkatan pelayanannya, agar para nasabah dapat menjadi loyal kepada lembaga itu sendiri. Selain itu pelayanan atas keluhan nasabah harus juga menjadi prioritas bank syariah dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah. Saat ini hampir seluruh bisnis mengedepankan aspek pelayanan bagi konsumen atau nasabah mereka. Karena pelayanan yang baik akan berdampak pada tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

loyalitas nasabah.[130] BNI Syariah melakukan pengungkapan terkait peningkatan pelayanannya memang tidak dijelaskan peningkatan seperti apa. Akan tetapi dari pernyataan yang ada di laporan tahunan bahwa peningkatan kualitas layanan BNI Syariah pada tahun 2017 mendapatkan beberapa penghargaan terkait dengan layanannya. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam kualitas layanan BNI Syariah tidak perlu diragukan lagi.

Item keempat yang diungkapkan adalah keluhan pelanggan/kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Suatu perusahaan diharapkan tidak hanya berfokus pada produk yang dihasilkan (*product-oriented*) melainkan memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memuaskan (*consumer-oriented*) dengan menyediakan pusat layanan keluhan konsumen setelah proses jual beli.[131] Pada item yang keempat ini BNI Syariah melakukan pengungkapannya dengan penjelasan terkait mekanisme dan proses pengaduan dan penanganan nasabah. Sebagaimana penjelasannya termasuk dalam sub-bab tanggung jawab kepada nasabah. Pada mekanisme dan proses pengaduan para nasabah dapat menjelaskan keluhan yang mereka alami pada saat melakukan transaksi atau hanya berkonsultasi di BNI Syariah. Dalam pengungkapannya BNI Syariah juga melaporkan secara rinci pada tahun 2017 tentang berapa jumlah keluhan atau pengaduan nasabah dan sudah berapakah yang terselesaikan, dan lain

[130] Ibid., 38
[131] Citra Indah Merina dan Verawaty, "Pengungkapan Indeks Islamic.., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainnya. Pada laporan tahun 2017 BNI Syariah mampu mengungkapkan secara rinci kegiatan terkait dengan proses penyelesaian pengaduan nasabah mereka. Item ini menjadikan keharusan bagi instansi atau lembaga syariah dalam mengungkapkannya pada laporan tahunan mereka.

Tema yang kedua adalah produk dan jasa yang telah diungkapkan oleh BNI Syariah. BNI Syariah mengungkapkan seluruh item yang ada pada tema kedua ini, membuktikkan bahwa suatu bank syariah perlu dan harus mengungkapkan item-item tentang kejelasan produk dan layanan yang mereka miliki.

3) **Tema Tenaga Kerja**

Pada tema ketiga ini seluruh item Indeks ISR diungkapkan dalam laporan tahun 2017 BNI Syariah. Item yang pertama adalah karakteristik pekerjaan. Karakteristik pekerjaan memang perlu diungkapkan agar pembaca atau *stakeholder* mengetahui posisi jabatan masing-masing pegawai. Item ini diungkapkan oleh BNI Syariah tidak secara rinci sebagaimana harus ada pernyataan tentang jumlah jam kerja, rasio gaji, dan lain-lain. BNI Syariah mengungkapkan item ini pada kolom survey opini pegawai. Dan pertanyaan yang menjadi survey berkaitan dengan lingkup pekerjaan seperti interaksi sesama pegawai, adanya rasa saling menghargai, fasilitas yang diberikan perusahaan, dan lain sebagainya. BNI Syariah mengungkapkan item ini dengan cukup baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Item kedua yang diungkapkan adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya memang perlu untuk diungkapkan, mengingat perusahaan dapat bekerja karena bantuan dari pengalaman pegawainya. Pada item yang kedua BNI Syariah mengungkapkannya secara rinci. BNI Syariah menjelaskan metode pelatihan dan pengembangan yang terlaksanakan sepanjang tahun 2017. Item yang kedua ini diharuskan bagi instansi atau lembaga syariah mengungkapkannya dalam laporan tahunan karena berhubungan dengan pelayanan yang diberikan lembaga kepada para pegawainya.

Item yang diungkapkan ketiga adalah kesempatan yang sama. Pada item ini BNI Syariah melakukan pengungkapannya dalam pernyataan bahwa memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawainya. Sebagaimana para pegawai BNI Syariah mendapatkan kesempatan yang sama untuk promosi secara *fair*. Dan juga BNI Syariah memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang atau pegawainya dalam menjadi nominasi sebagai dewan komisaris dan direksi. Pada tahap evaluasi BNI Syariah melakukannya dengan cara yang sama tanpa melihat jenis kelamin, ras, maupun sumber rekomendasi awal. Item ini tidak diharuskan atau diwajibkan untuk diungkapkan, akan tetapi lebih baik diungkapkan mengingat para pegawai atau *stakeholder* terutama *stakeholder* muslim mengetahui bahwa dalam penetapan direksi dan dewan komisarisnya BNI Syariah tidak pandang bulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Item yang keempat adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Memberikan kesehatan dan keselamatan kerja kepada pegawai merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan. Pada item ini BNI Syariah mengungkapkannya bahwa kesehatan dan keselamatan kerja pegawai menjadi komitmen perseroan. BNI Syariah juga mengungkapkan bahwa keluarga pegawai diberikan fasilitas kesehatan dengan ketentuan yang berlaku. BNI Syariah juga memberikan pengelolaan risiko kecelakaan kerja. Walaupun karakteristik kerja di BNI Syariah memiliki tingkat kecelakaan kerja yang rendah, akan tetapi BNI Syariah tetap memberikan pengelolaan risiko apabila terjadi kecelakaan kerja kepada para pegawainya. BNI Syariah juga mengungkapkan adanya club atau kelompok bermain untuk pegawai BNI agar dapat menyalurkan hobi dan kreativitasnya diluar jam kerja. BNI Syariah melakukan pengungkapan item ini sangat baik.

Item yang kelima adalah lingkungan kerja terdapat. Lingkungan kerja memberikan dampak sosial bagi para pegawainya dan perusahaan atau perseroan perlu menjamin lingkungan kerja yang baik bagi para pegawainya. Item ini diungkapkan oleh BNI Syariah dalam tingkat *turn over* pegawai. Pada item lingkungan kerja BNI Syariah melakukan pengelolaan sumber daya insaninya secara adil dan transparansi, sejalan dengan budaya BNI Syariah yang amanah dan jamaah. BNI Syariah berhasil menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi para pegawainya terbukti dari pengungkapan yang dilakukannya dalam tabel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

turn over pegawai. Pada tabel tersebut terlihat jelas perbandingan antara pegawai yang masuk dengan pegawai yang keluar. Item ini menjadi keharusan bagi instansi untuk mengungkapkannya, karena untuk membuktikan bahwa lembaga atau instansi tersebut memberikan pelayanan yang baik kepada para pegawainya.

Item yang terakhir adalah perekrutan khusus. Item yang keenam diungkapkan oleh BNI Syariah pada pelaporannya. Item ini ditunjukkan kepada calon pegawai yang memiliki pengalaman kerja ditempat sebelumnya. BNI Syariah mengungkapkan bahwa calon pegawai yang memiliki pengalaman harus di referensi *checking* pada tempat kerja sebelumnya, untuk membuktikan bahwa calon pegawai tersebut memang memiliki *track record* yang bagus. Item ini hanya dikhususkan untuk calon pegawai yang memiliki pengalaman yang bagus. Item ini tidak diharuskan untuk diungkapkan, tetapi jika lembaga mengungkapkannya itu jauh lebih baik. Agar para *stakeholder* atau calon pegawai yang mempunyai pengalaman dapat mengetahui informasi pekerjaan yang diberikan oleh BNI Syariah.

Pada tema yang ketiga ini BNI Syariah mengungkapkannya dengan sangat baik. Seluruh item yang diungkapkan oleh BNI Syariah dapat memberikan informasi yang jelas bagi calon pegawai maupun para *stakeholder*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Tema Sosial

Seluruh item yang ada pada tema ini diungkapkan oleh BNI Syariah kecuali satu item yaitu kegiatan kepemudaan. Item pertama yang diungkapkan adalah shadaqoh/donasi. Shodaqoh/donasi wajib ada dalam laporan pertanggung jawaban, karena item ini menunjukkan bahwa suatu lembaga atau instansi melakukan tindakan sosial kepada masyarakat sekitarnya. Dan item ini sangat dianjurkan kepada sesama kaum muslimin bahwa sedekah itu perlu untuk membantu sesama. Pada item yang pertama ini terdapat di pembahasan tentang Yayasan Hasanah Titik. BNI Syariah menjelaskan sedekah yang mereka lakukan tergabung dalam lembaga yang didirikannya yaitu Yayasan Hasanah Titik.

Item yang kedua adalah wakaf. Wakaf juga menjadi item yang diharapkan untuk ada dalam pengungkapan laporan tahunan, karena item ini bersifat saling tolong menolong. Item ini diungkapkan guna untuk memperlihatkan bahwa lembaga keuangan memiliki tanggung jawab dengan menolong sesama. Dan BNI Syariah membuktikan bahwa mereka melakukan wakaf dengan memberikan wakaf hasanah yang berupa 1 unit bis. Pada item yang kedua ini BNI Syariah membuktikan bahwa suatu perseroan atau lembaga wajib untuk melakukan kerja sosial dengan cara membantu sesama dalam bentuk wakaf. Diharapkan agar lembaga keuanga lainnya untuk dapat mengungkapkan item ini guna untuk informasi kepada *stakeholder* muslim bahwa perusahaan atau lembaga memiliki tanggung jawab sosial yang baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Item yang ketiga adalah *qard hasan*. Item yang ketiga ini guna untuk memberikan informasi tentang pinjaman dana kebajikan bagi orang-orang yang kurang mampu. Pinjaman ini diharapkan oleh BNI Syariah untuk dapat sebagai penunjang para kaum dhuafa. BNI Syariah mengungkapkan dalam pelaporannya bahwa memberikan modal usaha untuk kaum dhuafa. Modal usaha tersebut diharapkan agar para kaum dhuafa dapat mengembangkan usahanya atau memulai usahanya agar kehidupan mereka lebih baik dan terjamin. BNI Syariah melakukan pengungkapan item ketiga ini dengan sangat baik dan dapat dilihat bahwa BNI Syariah mempunyai kewajiban untul saling tolong menolong kepada sesama.

Item keempat adalah zakat atau sumbangan dari karyawan atau nasabah. Item yang keempat diharapkan seluruh instansi atau lembaga untuk mengungkapkannya agar para karyawan mempunyai sifat sosial, walaupun hanya dengan zakat diperolah dari gaji mereka. BNI Syariah mengungkapkan item tentang zakat dari karyawan. Hal tersebut membuktikan bahwa BNI Syariah menerapkan sifat sosial kepada para karyawannya untuk saling tolong menolong kepada sesama.

Item kelima adalah pendidikan. Pendidikan memang perlu untuk diungkapan dalam laporan tahunan atau pertanggung jawaban, karena item ini dapat membuktikan bahwa suatu lembaga atau perseroan memberikan bantuan kepada sesama melalui pendidikan. BNI Syariah memberikan beberapa bantuan pendidikan yaitu; memberikan 17 taman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baca/perpustakaan, 20 perpustakaan keliling, 730 beasiswa, 5 sekolah yang akan direnovasi. Dengan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BNI Syariah dalam memberikan bantuan pendidikan itu membuktikan bahwa BNI Syariah membantu sesama tidak peduli dari aspek ekonomi ataupun pendidikan.

Item keenam adalah bantuan kesehatan. Bantuan kesehatan memang perlu untuk diungkapkan, karena suatu perseroan atau lembaga wajib memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat disekitar perseroan/lembaga tersebut. Bantuan kesehatan diberikan agar masyarakat sekitar terhindar dari berbagai penyakit dan perusahaan/lembaga tidak menjadi penyebab apabila ada penyakit didaerah tersebut. BNI Syariah mengungkapkannya bahwa bantuan kesehatan yang mereka berikan berupa layanan program kesehatan dan program kacamata gratis. BNI Syariah berharap bahwa bantuan yang mereka berikan agar digunakan dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat sekitar. BNI Syariah melakukan item keenam ini dengan baik dan diharapkan bantuan kesehatan selalu diberikan kepada masyarakat sekitar.

Item ketujuh adalah pemberdayaan ekonomi. Item ketujuh ini berguna untuk memberdayakan masyarakat bahwa ekonomi adalah komponen penting dalam kehidupan. Apalagi Indonesia telah mengembangkan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) itu berarti masyarakat Indonesia harus memberdayakan ekonominya agar tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketinggalan oleh negara asean lainnya. BNI Syariah mengungkapkan item ini bahwa yang diberikannya adalah program pengembangan ekonomi pesantren, pemberdayaan ekonomi di 6 komunitas ibu rumah tangga, dan pemberdayaan ekonomi melalui duta hasanah BNI Syariah. Hal tersebut membuktikan bahwa BNI Syariah melakukan pemberdayaan ekonomi dari berbagai kalangan. Patut dicontoh kepada para lembaga keuangan atau perseroan lainnya bahwa pemberdayaan ekonomi tidak hanya pada UMKM tapi bisa ke berbagai pihak (santri, siswa, ibu rumah tangga, dan lain-lain).

Item kedelapan adalah kepedulian terhadap anak yatim piatu. Kepedulian terhadap anak yatim piatu memang perlu untuk diungkapkan oleh perseroan/lembaga, karena item ini dapat menilai sifat sosial dari suatu perusahaan. BNI Syariah mengungkapan item ini berdasarkan kegiatan yang mereka lakukan sejak 2015 yaitu memberikan program santunan kepada yatim dhuafa. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa BNI Syariah memiliki sifat sosial yang tinggi terhadap yatim dhuafa.

Item kesembilan adalah pembangunan atau renovasi masjid. Pembangunan atau renovasi masjid perlu untuk diungkapkan oleh suatu perseroan/lembaga terutama lembaga yang berbasis syariah. Karena pembangunan masjid atau renovasi dapat membuat kaum Islam lebih nyaman dan sering mendatangi masjid. Apalagi masjid adalah tempat ibadah yang dianggap sebagai rumah Allah. Sebagaimana orang Islam mengadu keluh kesal mereka kepada Allah melalui ibadah. BNI Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkapkan item ini bahwa mereka memberikan bantuan sosial dengan pembangunan 2 masjid di Lebak dan Mentawai. BNI Syariah berharap bahwa masjid yang mereka bangun agar terawat dengan baik dan digunakan dengan semestinya.

Item kesepuluh adalah kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bareng, dan lain-lain). Item ini tidak harus diungkapkan oleh perseroan/lembaga, karena item ini hanya menunjukkan kegiatan sosial lainnya yang diberikan oleh perseroan/lembaga kepada masyarakat sekitarnya. BNI Syariah mengungkapkan bahwa kegiatan sosial lainnya yang mereka lakukan berkaitan dengan berbagai kegiatan Ramadhan diantaranya; mudik hasanah, takjil hasanah, tadarus anak hasanah, dan lain-lain. BNI Syariah memberikan bantuan kegiatan sosial yang religious guna untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan ilmu keagamaannya. Item ini perlu untuk diungkapkan oleh lembaga keuangan syariah, agar dapat memberikan informasi kepada para *stakeholder* tentang bantuan yang diberikan kepada sesama.

Item yang terakhir adalah sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain-lain. Pada item yang terakhir ini suatu perseroan/lembaga tidak wajib untuk diungkapkan, akan tetapi lebih baik untuk diungkapkan. Karena item ini menunjukkan bahwa perseroan atau lembaga melakukan kegiatan sosial mereka dengan membantu kegiatan kelompok atau organisasi masyarakat berupa *sponsorship.* BNI Syariah mengungkapkan item ini bahwa setiap tahun mereka ikut serta dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai kegiatan di masyarakat melalui *sponsorship*. Hal tersebut membuktikan bahwa BNI Syariah melakukan kegiatan sosial dari berbagai segi, segi kaum dhuafa ataupun masyarakat menengah.

Pada tema yang keempat ini BNI Syariah melakukan pengungkapan yang baik. Dan dari beberapa item yang diungkapkan oleh BNI Syariah ada satu item yang belum diungkapkan, yaitu kegiatan kepemudaan. Mungkin saja BNI Syariah melakukan kegiatan kepemudaannya berupa *sponsorship* maka dari item ini tidak diungkapkan tersendiri melainkan tergabung menjadi satu pada item yang terakhir.

5) Tema Lingkungan

Pada tema ini hanya ada 4 item yang diungkapkan yaitu item yang pertama adalah kampanye *go green*. Kampanye *go green* memang perlu untuk dilakukan oleh perseroan/lembaga karena sebagai bentuk wujud syukur dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. BNI Syariah mengungkapkan item ini melalui duta hasanah yang telah ditunjuk. Jadi BNI Syariah tidak melakukan kampanye *go green* secara langsung tetapi melalui duta hasanah yang mereka miliki. Hal tersebut dapat memperlihatkan bahwa BNI Syariah memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

Item yang kedua adalah konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan adalah perlindungan atau pelestarian terhadap lingkungan. Item ini perlu diungkapkan agar lembaga/perseroan dapat membuktikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan sekitarnya. BNI Syariah mengungkapkan item ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Dan diungkapkannya yaitu dengan kegiatan konservasi mangrove di Tanjung Pasir yang dilakukan oleh BNI Syariah. Hal tersebut dapat dilihat bahwa BNI Syariah memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan melalui konservasi mangrove.

Item ketiga yang diungkapkan adalah perbaikan dan pembuatan sarana umum. Perbaikan dan pembuatan sarana umum perlu diungkapkan agar suatu perusahaan/lembaga membuktikkan bahwa lingkungan sekitar tidak hanya tentang flora/fauna saja. Dan item ini membuktikkan bahwa perseroan/lembaga mempunyai tanggung jawab lingkungan melalui perbaikan sarana umum. BNI Syariah mengungkapkannya melalui pemberian kepada 6 desa yang menerima manfaat program MCK. BNI Syariah membantu desa-desa yang kesulitan dalam hal sarana umum yaitu MCK. Hal itu membuktikan bahwa BNI Syariah melakukan tanggung jawab lingkungannya secara baik dan amanah.

Dan item yang terakhir adalah kebijakan manajemen lingkungan. Kebijakan perseroan/lembaga dalam hal lingkungan perlu adanya suatu manajemen, agar lingkungan sekitar dapat dijaga dan tidak mudah tercemar. BNI Syariah mengungkapkan item ini yaitu dengan melakukan program GEN-Xtra. GEN-Xtra diterapkan oleh BNI Syariah sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan cara mengurangi penggunaan kertas dan penghematan energi. Pada item yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terakhir ini dapat dilihat bahwa BNI Syariah melakukan segala kegiatan dengan menerapkan program guna untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Walaupun kegiatan tersebut dianggap sebagai kegiatan kecil akan tetapi dampak yang diterima oleh lingkungan adalah sangat baik. Dan pada tema yang kelima ini BNI Syariah melakukan pengungkapkannya dengan baik, walau ada beberapa yang tidak diungkapkan.

Pada tema yang kelima ini BNI Syariah belum mengungkapkannya secara rinci atau lengkap. Ada 3 item yang belum diungkapkan oleh BNI Syariah, diantaranya; perlindungan terhadap flora dan fauna liar atau terancam punah, polusi, dan audit lingkungan. Selanjutnya diharapkan bagi BNI Syariah untuk mengungkapkan ketiga item tersebut, agar para *stakeholder* dapat mengetahui bahwa BNI Syariah memiliki tanggung jawab lingkungan yang baik.

6) **Tema Tata Kelola Organisasi**

Pada tema ini seluruh item terdapat pada pengungkapan pelaporan BNI Syariah tahun 2017. Item yang pertama adalah profil dan strategi organisasi. Item ini wajib untuk diungkapkan oleh suatu perseroan/lembaga, karena item ini membuktikan bawa profil dan strategi yang mereka mempunyai memiliki tujuan yang jelas. BNI Syariah mengungkapkan item ini di salah satu bab dalam laporan pertanggung jawabannya yang berupa laporan tahunan. BNI Syariah mengungkapkan item ini secara detail/rinci sehingga bagi para pembacanya dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui dengan jelas apa tujuan BNI Syariah. Hal tersebut membuktikan bahwa suatu perusahaan wajib untuk mengungkapkan item ini terlepas dari lembaga yang berdasarkan syariah atau tidak.

Item yang kedua adalah struktur organisasi. Item ini wajib diungkapkan oleh perseroan/lembaga karena untuk memperlihatkan tatanan kelola perusahaan dan juga dapat menunjukkan alur atau posisi para direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah. Pengungkapan yang dilakukan oleh BNI Syariah dalam tema ini telah sesuai dengan surat keputusan direksi, oleh karena itu struktur yang diungkapkan benar dan jelas adanya. BNI Syariah mengungkapkan item ini dengan jelas yaitu berupa struktur dan penjelasan kinerja masing-masing direksinya. Pada item ini BNI Syariah mengungkapkannya dengan sangat rinci sehingga pembaca tidak kebingungan dalam melihat struktur organisasinya.

Item ketiga adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Item ini menunjukkan tata kelola suatu perusahaan. Item ini menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh dewan komisaris. Dan BNI Syariah mengungkapkan item ini secara rinci dapat dilihat di laproan pertanggung jawabannya. Pada tema ini BNI Syariah melakukan tata kelola yang baik sehingga para pembacanya mengetahui tentang tugas dan tanggung jawab dari dewan komisaris.

Item keempat adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. Item keempat hampir sama item yang ketiga. BNI Syariah juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkapkannya secara rinci dan mendetail sehingga para pembaca tidak kebingungan dalam mengetahui tugas dan tanggung jawab direksi.

Item kelima adalah kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite halaman 239. Item kelima ini hamper sama dengan item yang ketiga dan keempat bahwa perusahaan wajib menunjukkan tata kelola perusahaannya. BNI Syariah mengungkapkan item ini guna untuk menunjukkan tentang tugas dan pelaksanaan tugas dari komite. Agar para pembaca mengetahui apa saja tugas dan pelaksanaan tugas komite di BNI Syariah.

Item keenam adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah. Item ini sama seperti sebelum-sebelumnya bahwa perusahaan perlu mengungkapkan tata kelolanya guna untuk memberikan informasi kepada para *stakeholder* bahwa perusahaan tersebut transparansi. BNI Syariah mengungkapkan item ini untuk membuktikan bahwa mereka melakukan transparansi. Pada item ini BNI Syariah melakukan tata kelola organisasi yang baik dan secara rinci.

Item yang diungkapkan ketujuh adalah pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Item ini diungkapkan agar lembaga yang berbasis syariah terbukti bahwa lembaga tersebut sudah sesuai syariah Islam. BNI Syariah mengungkapkan item ini secara rinci agar para *stakeholder* mengetahui bahwa BNI Syariah menerapkan prinsip syariah dalam transaksinya. Item

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini membuktikan bahwa BNI Syariah melakukan transaksi berdasarkan pirnsip syariah.

Item kedelapan adalah penanganan benturan kepentingan terdapat. Item ini perlu diungkapkan agar suatu perusahaan/organisasi dapat dikelola secara baik walaupun adanya suatu benturan kepentingan dalam organisasinya. BNI Syariah mengungkapkan item ini secara jelas da nada beberapa penanganan agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam organisasinya.

Item kesembilan adalah penerapan fungsi kepatuhan bank. Item ini wajib untuk diungkapkan agar tata kelola perusahaan/organisasi memiliki acuan. Fungsi kepatuhan patut dijalankan agar segela tatanan perusahaan tidak bercampur aduk. BNI Syariah mengungkapkan item ini bahwa kepatuhan dalam organisasi atau perusahaan patut diberlakukan agar memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan tidak pecah.

Item kesepuluh adalah penerapan fungsi audit intern. Fungsi audit intern perlu diungkapkan agar para *stakeholder* percaya bahwa perusahaan/organisasi memiliki system audit internalnya. Yang mana audit tersebut berguna untuk mencega kegiatan menyimpang didalam perusahaan atau organisasi. BNI Syariah mengungkapkan item ini secaa rinci agar *stakeholder* tidak ragu untuk memilih BNI Syariah sebagai bank syariah pilihannya.

Item kesebelas adalah penerapan fungsi audit ekstern pada. Fungsi audit ekstern memang perlu untuk mencegah timbulnya kejahatan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luar dan agar menjadi seimbang bagi perusahaan/organisasi. Dengan adanya fungsi audit ekstern maka para *stakeholder* tidak perlu ragu untuk memilih BNI Syariah sebagai bank pilihannya. BNI Syariah mengungkapkan item ini untuk menunjukkan tata kelola yang mereka miliki adalah yang baik dari lainnya.

Item yang diungkapkan keduabelas adalah batas maksimum penyaluran dana. Batas maksimum penyaluran dana memang perlu untuk diungkapkan agar para *stakeholder* mengetahui aturan yang ada di perusahaan/organisasi dalam menyalurkan dana yang melebihi aturan yang ada di perusahaan tersebut. Informasi tentang item ini diharapkan agar dijelaskan secara rinci guna untuk membantu nasabah-nasabah yang mengharuskan menyalurkan dananya secara besar-besaran. BNI Syariah menungkapkan item ini dengan baik, karena dalam memiliki tata kelola oragnisasi yang baik mereka merasa untuk membatasi penyaluran dannya. Agar nasabah tidak dibebaskan dalam meyalurkan dananya, dikhawatirkan terjadi kasus pencucian uang.

Item ketigabelas adalah transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Item ini wajib diungkapkan agar *stakeholder* mengetahui bahwa kondisi keuangan suatu perusahaan/organisasi wajib dilaporkan secara transparansi. Apalagi item ini berguna untuk para nasabah yang menabung diorganisasi/perusahaan. BNI Syariah mengungkapkan item ini secara baik. BNI Syariah beranggapan bahwa memiliki tata kelola perusahaan yang baik juga harus melakukan transparansi dalam kondisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan dan non keuangannya. Maka dari itu dalam item ini BNI Syariah melakukan pengungkapan dengan baik.

Item keempatbelas adalah kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya. Item ini wajib diungkapkan agar para *stakeholder* mengetahui bahwa perusahaan memiliki kebijakan jika terjadi pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya. BNI Syariah mengungkapkan item ini secara rinci agar para nasabah dan *stakeholder* yakin bahwa BNI Syariah memiliki kebijakan yang baik dan tegas dalam membasmi praktik penyimpangan.

Item yang terakhir adalah etika perusahaan. Etika perusahaan memang perlu untuk diungkapkan dalam laporan pertanggung jawaban suatu perusahaa. Apalagi untuk memiliki tata kelola yang baik perusahaan wajib memiliki etika dalam melakukan segala kegiatan operasionalnya. BNI Syariah mengungkapkan item ini secara rinci sehingga para *stakeholder* mengetahui bahwa BNI Syariah memiliki etika dalam kegiatan operasionalnya. BNI Syariah mengungkapkan bahwa dalam tata kelola perusahaan yang dimilikinya mempunyai kode etik sebagai pedoman kinerja mereka.

Pada tema yang terakhir ini BNI Syariah mampu mengungkapkan keseluruhan item yang ada di tema ini. Sehingga BNI Syariah membuktikan bahwa mereka memiliki tata kelola perusahaan/organisasi yang baik. Dan mungkin saja ini menjadi salah satu alasan mengapa BNI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah meraih penghargaan *The Best GCG* yang merupakan ketiga kalinya berturut-turut yang diterima sejak tahun 2016.

BNI Syariah memperoleh 43 item yang sesuai dengan Indeks ISR dalam mengungkapkan laporan tahun 2017. Dari jumlah perolehan yang didapat BNI Syariah, berikut ini presentase yang diperoleh BNI Syariah dalam Indeks ISR:

$$\text{Pengungkapan ISR} = \frac{\text{Jumlah skor pengungkapan yang dipenuhi}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times 100\%$$

$$\text{Pengungkapan ISR} = \frac{43}{50} \times 100\%$$

$$\text{Pengungkapan ISR} = 86\%$$

Dari hasil peroleh Indeks ISR yang didapatkan BNI Syariah pada pengungkapan dalam laporan tahun 2017. Menunjukkan bahwa ada 43 item dari total 50 item yang sesuai dengan Indeks ISR. Hal itu membuktikan bahwa BNI Syariah telah melakukan pengungkapan dalam laporan tahunannya sesuai dengan asas syariah. Dan dari presentase yang didaptkan oleh BNI Syariah adalah 86% pengungkapan yang dilakukannya telah sesuai dengan Indeks ISR. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh BNI Syariah baik.

BNI Syariah dalam penyajian laporan tahunannya selain mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Bank, juga mengacu pada Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-431/BL/2012, Peraturan No. X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Selain aturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari OJK yang digunakan oleh BNI Syariah dalam penyajian laporannya juga dapat membuat BNI Syariah unggul memenangkan berbagai penghargaan. Dari keputusan bapepam LK X.K.6 dibuatkan Indeks X.K.6 yang digunakan sebagai acuan dalam penyajian laporan tahunan BNI Syariah. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan mengapa BNI Syariah meraih berbagai penghargaan pada tahun 2017. Karena pada laporan tahunan yang mereka sajikan tidak menggunakan peraturan OJK saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Skripsi dengan judul "Analisis Pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* pada Bank Syariah di Indonesia (Studi Empiris Bank BNI Syariah di Indonesia)" memiliki beberapa kesimpulan diantaranya;

1. Pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* pada Bank Syariah menjelaskan bahwa Bank Syariah di Indonesia dalam penyajian laporan tahunannya mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Bank. *Islamic Social Reporting Index* memiliki poin yang berbeda dengan POJK yaitu pada item transaksi yang diharamkan dalam Islam. Masih belum ada regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaporan bank syariah terutama yang sesuai dengan *Islamic Social Reporting. Islamic Social Reporting Index* saat ini dapat dianalisis pada Bank Umum Syariah, karena penyajian laporan tahunan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah berbeda dengan Unit Usaha Syariah.
2. Pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah menjelaskan bahwa Hasil pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah sangat baik. Hampir seluruh item yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diungkapkan oleh BNI Syariah di laporan tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2017. BNI Syariah mengungkapkan 43 item. BNI Syariah mendapatkan presentase Indeks ISR sebesar 86%. BNI Syariah dalam penyajian laporannya selain dari POJK juga mengacu pada Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-431/BL/2012, Peraturan No. X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Dan BNI Syariah menggunakan Indeks Bapepam LK X.K.6 dan ARA.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Saran yang diperoleh dari Pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* pada Bank Syariah: Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk membuat regulasi atau aturan dalam penyajian laporan tahunan bagi bank syariah. Diharapkan aturan yang dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan memiliki nilai-nilai yang Islami dan sesuai dengan *Islamic Social Reporting*.
2. Saran yang diperoleh dari Pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* pada BNI Syariah: Diharapkan BNI Syariah dalam penyajian laporan tahunan selanjutnya mengadopsi beberapa item yang ada di dalam *Islamic Social Reporting Index*. BNI Syariah diharapkan menjadi contoh bagi bank syariah lainnya dalam penyajian laporan tahunannya.
3. Saran bagi penelitian selanjutnya: Perlu dikembangkan lagi teori tentang *Islamic Social Reporting* dan Indeks yang digunakan lebih dikembangkan. Dan objek yang diteliti lebih banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Asriati, Riri et al. ”Analisis Perbandingan Komponen Islamic Social Reporting (ISR) Pada Bank Syariah Antara Negara Indonesia dan Malaysia”. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*. Universitas Jenderal Soedirman. 2016.

Astuti, Tika. “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Leverage* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di JII Tahun 2010-2012)”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: tp. t t.

Cahya, Bayu Tri. *Islamic Social Reporting REPRESENTASI TANGGUNG JAWAB DAN AKUNTABILITAS PERUSAHAAN BERBASIS SYARIAH.* Bogor: UIKA PRESS. 2018.

E, Suharto. “CSR Syariah”. *Majalah Bisnis & CSR*. Vol. 3 No. 16. Agustus. 2010.

Faricha, Nailil. “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2011 – 2014”*, Jurnal Akuntansi Unesa* No. 1, Vol. 4. Universitas Negeri Surabaya. 2015.

Fauziah, Khusnul dan Yudho J, Prabowo. “Analisi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting* Indeks”. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. No. 1, Vol. 5. Universitas Negeri Semarang. 2013

Fitria, Soraya dan Hartanti, Dwi. “Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan *Global Reporting Intiative* Indeks dan *Islamic Social Reporting* Indeks”. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*. Universitas Indonesia. 2010.

Firmansyah, Irman. *Tanggung jawab sosial perbankan syariah: suatu kajian dalam pengungkapan laporan tahunan manurut pandangan islam (studi di Indonesia dan Malaysia)*. Bandung: Mujahid Press. 2013.

Gray, R et.al. “Methodological themes: constructing a research database of social and environmental reporting by UK companies”. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* Vol. 8 No. 2. 1995.

Gustani. “Analisis Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial Bank Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)”. (Skripsi—Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Depok. 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haniffa, Ross dan Hubaid, M. "Exploring the Ethical Identity of Islamic Bank Via Communication in Annual Reporting". *Journal of Business Ethic*. 2007.

Kuntari, Yeni dan A. Sulistyani. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan Indeks Letter Quality (LQ 45) Tahun 2005". *ASET*, Vol. 9 No. 2 Agustus. 2007.

Merina, Citra Indah dan Verawaty. "Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting Perusahaan Go Publik yang Listing di Jakarta Islamic Index". Palembang: Universitas Bina Darma. *Jurnal Ilmiah MBiA* Vol.15 No.1 Agustus 2016.

Muchlis, Saiful dan Auliah, Rizki. "Implementasi Islamic Social Reporting dalam Pengembangan Pembiayaan Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar". *ASSETS*. Volume 6. Nomor 2. Desember 2016.

Munandar, Jono M et.al. Pengantar Manajemen Panduan Komprehensif Pengelolaan Organisasi. Bogor: IPB Press, 2014.

Putra, Viki Merdeka. "Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan *Global Reporting Intiative* Indeks dan *Islamic Social Reporting* Indeks". Skripsi--Universitas Muhammadiyah Gresik. Gresik. 2013.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Bank

Rama, Ali dan Meliawati. "Analisis Determinan Pengungkapan *Islamic Social Reporting*: Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia". *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. No. 1,Vol. 2. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.

R, Nurlela dan Islahuddin. "Pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan presentase kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating". *Simposium Nasional XI*. Pontianak. 2008.

Rosiana, Rita et al. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Islamic Governance Score* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)", *E S E N S I Jurnal Bisnis dan Manajemen* No. 1, Vol. 5. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sari, Dea Devita. "Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Tahun 2014-2016". Skripsi--IAIN Surakarta. Surakarta. 2018.

Savira, Mariska Nanda. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, *Cross-Directorship*, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)". Skripsi—Universitas Negeri Semarang. Semarang. 2015.

Sinaga, Nurhayati. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Corporate Sociall Responsibility (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)". Skripsi—Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2016.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2015.

Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik: Fascho Publishing. 2007.

Widarto. "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah Tahun 2015)". Naskah Publikasi Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 2017.

Widiawati, Septi. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* Perusahaan-Perusahaan yang Terdapat Pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011". Skripsi—Universitas Diponegoro. Semarang. 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BNI Syariah, "Sejarah", https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah diakses pada 8 November 2018.

BNI Syariah, "Penghargaan", https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/penghargaan diakses pada 8 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BNI Syariah, "Visi & Misi", https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi diakses pada 23 November 2018

BNI Syariah, "Tentang BNI Syariah", https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/profileperusahaan pada 23 November 2018.

Data Sekunder Laporan Tahunan 2017 Publikasi BNI Syariah.

Faisal Ramadhan. Business Manager BNI Syariah Kantor Cabang Dharmawangsa Surabaya. *Wawancara*. Surabaya. 4 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id